

**ANALISIS PERAN BADAN USAHA MILIK DESA DALAM PENANGGULANGAN
KEMISKINAN BERBASIS KEMANDIRIAN DI DESA BISSOLORO
KECAMATAN BUNGAYA KABUPATEN GOWA**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum Ekonomi Syari'ah (SH) Pada Program Studi
Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Makassar

Oleh :

**S A R M I N
10525029915**

**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
1439 H / 2018 M**



**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Kantor : Jl. Sultan Alauddin, Gedung Iqra, Lt. 4 II/17/Fax/Tel. (0411) 851914 Makassar 90223

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi saudara SARMIN, NIM. 105 250 299 15 yang berjudul “**Analisis Peran Badan Usaha Milik Desa dalam Penanggulangan Kemiskinan berbasis Kemandirian di Desa Bissoloro Kecamatan Bungaya Kabupaten Gowa**” telah diujikan pada hari Sabtu 26 Muharram 1440 H / 06 Oktober 2018 M, dihadapan tim penguji dan dinyatakan telah dapat diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 26 Muharram 1439 H
06 Oktober 2018 M

Dewan Penguji,

Ketua : Dr. Ir. H. Muchlis Mappangaja, M.P.
Sekertaris : Hurriah Ali Hasan, S.T.,ME.,Ph.D
Anggota : Sitti Walidah Mustamin, S.Pd., M.Si
Hasanuddin, SE,Sy.,ME
Pembimbing I : Dr. H. Siradjuddin, SE.,M.Si
Pembimbing II : Hasanuddin, SE,Sy.,ME

Disahkan Oleh :

Dekan FAI Unismuh Makassar



Dr. H. Mawardi Pewangi, M.Pd.I
NBM : 554612



**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Kantor : Jl. Sultan Alauddin, Gedung Iqra, Lt. 4 II/17/Fax/Tel. (0411) 851914 Makassar 90223

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA MUNAQASYAH

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar telah mengadakan sidang Munaqasyah pada : Hari / Tanggal : Sabtu, 06 Oktober 2018 M / 26 Muharram 1440 H Tempat : Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar Jl. Sultan Alauddin No. 259 Makassar Gedung Iqra Lantai 4 Fakultas Agama Islam.

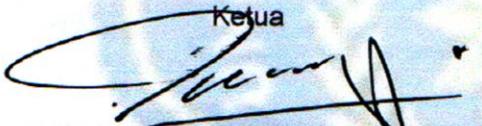
MEMUTUSKAN

Bahwa Saudara

Nama : **Sarmin**
NIM : **10525029915**
Judul Skripsi : **"Analisis Peran Badan Usaha Milik Desa dalam Penanggulangan Kemiskinan berbasis Kemandirian di Desa Bissoloro Kecamatan Bungaya Kabupaten Gowa"**

Dinyatakan : **LULUS**

Ketua

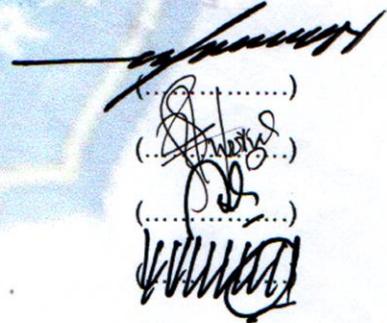

Drs. H. Mawardi Pewangi, M.Pd.I
NIDN: 0931126249

Sekretaris


Dra. Mustahidang Usman, M.Si
NIDN: 0917106101

Dewan Penguji :

1. Dr. Ir. H. Muchlis Mappangaja, M.P.
2. Hurriah Ali Hasan, S.T.,ME.,Ph.D
3. Sitti Walidah Mustamin, S.Pd., M.Si
4. Hasanuddin, SE,Sy.,ME



Disahkan Oleh :

Dekan FAI Unismuh Makassar


Drs. H. Mawardi Pewangi, M.Pd.I
NBM : 554612



**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Kantor : Jl. Sultan Alauddin, Gedung Iqra, Lt. 4 II/17/ Fax/Tel. (0411) 851914 Makassar 90223

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Analisis Peran Badan Usaha Milik Desa dalam Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Kemandirian di Bissoloro Kecamatan Bungaya Kabupaten Gowa
Nama : Sarmin
NIM : 10525029915
Fakultas/Prodi : Agama Islam / Hukum Ekonomi Syariah

Setelah dengan seksama memeriksa dan meneliti, skripsi ini dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diujikan didepan tim penguji ujian skripsi pada Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 13 Ramadhan 1439 H
28 Mei 2018 M

Disetujui Oleh :

Pembimbing I

Dr. Siradijuddin, S.E., M.Si
NIP. 196605092005011003

Pembimbing II

Hasanuddin, SE.Sy., M.E.
NIDN. 0927128903

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : SARMIN
NIM : 10525029915
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Agama Islam
Kelas : B

Dengan ini menyatakan hal sebagai berikut:

1. Mulai dari penyusunan proposal sampai selesai penyusunan skripsi ini, saya menyusun sendiri skripsi saya (tidak dibuatkan oleh siapapun)
2. Saya tidak melakukan penjiplakan (Plagiat) dalam penyusunan skripsi.
3. Apabila saya melanggar perjanjian pada butir 1, 2, dan 3 saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Demikian perjanjian ini saya buat dengan penuh kesadaran.

Makassar, 26 Muharran 1440 H

06 Oooktober 2018 M

Yang Membuat Pernyataan,

A 6000 Rupiah postage stamp with a signature over it. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text 'METERAI TEMPEL', 'TGL. 20', '69DF2AFF284286394', '6000', and 'ENAM RIBU RUPIAH'. The signature is written in black ink over the stamp.

SARMIN

NIM.10525029915

ABSTRAK

SARMIN. 105 250 299 15, Analisis Peran Badan Usaha Milik Desa dalam Penanggulangan Kemiskinan berbasis Kemandirian di Desa Bissoloro Kecamatan Bungaya Kabupaten Gowa. Dibimbing Oleh H. Sirajuddin & Hasanuddin.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran badan usaha milik desa dalam penanggulangan kemiskinan berbasis kemandirian di Desa Bissoloro Kecamatan Bungaya Kabupaten Gowa.

Uji yang dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif untuk mengkaji peran badan usaha milik desa dalam penanggulangan kemiskinan berbasis kemandirian di Desa Bissoloro. Untuk uji tersebut dilakukan dimana data diperoleh dengan cara melakukan wawancara mendalam kepada pihak Informan yakni Kepala Desa Bissoloro, Ketua BUMDES, Pengelola BUMDES dan Anggota BUMDES (Masyarakat Miskin).

Hasil Penelitian Menunjukkan bahwa (1) Model penanggulangan kemiskinan berbasis kemandirian melalui model pemberdayaan. Pemberdayaan disini ialah dengan memberikan arahan dan bantuan dana secara bergilir bagi masyarakat ekonomi rendah. (2) Peran BUMDES Abulo Sibatang dalam menanggulangi kemiskinan di Desa Bissoloro meliputi tiga bidang yaitu, lingkungan, sosial dan ekonomi. Bidang ekonomi yaitu meliputi pinjaman dana bergilir. Yang paling diunggulkan dan manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat miskin adalah pemberian dana bergilir.

Kata Kunci : BUMDES, Kemiskinan dan Kemandirian

ABSTRACK

SARMIN, 105 250 299 15. Analysis of Village-Owned Enterprises Roles in Independence-based Poverty Alleviation at Bissoloro Village, Bungaya District, Gowa Regency. Supervised by H. Sirajuddin & Hasanuddin.

This study aimed to determine the role of village-owned enterprises in independence-based poverty alleviation at Bissoloro Village, Bungaya District, Gowa Regency.

The test was carried out using the qualitative method to examine the role of village-owned enterprises in independence-based poverty alleviation in Bissoloro village. The test was conducted where the data was obtained by conducting in-depth interviews with the informants, they were: the chairman of Bissoloro Village, the chairman, the management and the members (poor society) of BUMDES.

The results of the study shown that 1) the model of poverty reduction was independence through an empowerment model. Empowerment by giving directions and funding assistance in turn for low economic society 2) The Role of BUMDES Abulo Sibatang in tackling poverty in Bissoloro Village included three aspects; revolving fund loans. The most favored and the benefits felt directly by the poor was revolving fund loans.

Keywords: BUMDES, Poverty and Independence

g/ce/2018/abstract
Lembaga
appriand
UIN Makassar

MOTTO

“Hanya karena seseorang terlihat baik, belum tentu mereka memang yang terbaik untukmu. Susu yang tumpah pun warnanya tetap putih.”

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah Rabbil Alamin, Puja dan puji senantiasa teriring dalam setiap hela nafas atas Kehadirat dan lindungan Allah SWT. Bingkisan salam dan salawat tercurah kepada Kekasih Allah, Nabiullah Muhammad SAW. Yang telah membawa ummatnya dari zaman jahiliyah ke zaman yang seperti sekarang ini.

Tiada jalan tanpa rintangan, tiada puncak tanpa tanjakan, tiada kesuksesan tanpa perjuangan. Dengan kesungguhan dan keyakinan untuk terus melangkah, akhirnya sampai di titik akhir pembuatan skripsi ini telah selesai. Namun, semua itu tak lepas dari uluran tangan berbagai pihak lewat dukungan, arahan, bimbingan serta bantuan moril dan materil.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih terdapat adanya kekurangan di dalamnya, baik dari sistematika penyusunannya maupun pembahasannya sehingga terwujudnya masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, demi kesempurnaan skripsi ini yang berjudul ***“Analisis Pengelolaan Dana Zakat untuk Mendorong Peningkatan Ekonomi Masyarakat di Kab. Pangkep (Badan Amil Zakat Nasional Kab. Pangkep)”*** Penulis dengan penuh rasa rendah dan ketulusan hati menerima segala bantuan moril dari semua pihak dalam memberikan kritik dan saran yang sifatnya membangun dan membina, dengan harapan skripsi ini dapat lebih bermanfaat bagi para pembacanya

terutama pada diri pribadi penulis demi pengembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan.

Ungkapan terima kasih penulis sampaikan kepada pihak-pihak yang telah membimbing penulis hingga saat ini:

1. Bapak Dr. Abd. Rahman Rahim, SE., MM, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Bapak Dekan Fakultas Agama Islam, Bapak Drs. H. Mawardi Pewangi, M.Pd.I.
3. Kepada Bapak Dr. Ir. H. Muchlis Mappangaja, MP, selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah.
4. Kepada Bapak Hasanuddin, SE.Sy, selaku sekretaris Prodi Hukum Ekonomi Syariah sekaligus pembimbing II dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Kepada Bapak Dr. H. Siradjuddin, SE., M.Si selaku pembimbing I penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen beserta Staf Administrasi Universitas Muhammadiyah Makassar, khususnya Fakultas Agama Islam yang telah banyak menuangkan ilmunya kepada kami.
7. Kepada seluruh Keluarga BUMDES Abulo Sibatang Desa Bissoloro Kecamatan Bungaya Kabupaten Gowa yang membantu dan memfasilitasi selama peneliti melakukan penelitian.
8. Ucapan terima kasih dan kasih sayang yang tak terhingga penulis persembahkan kepada kedua orang tua yang selalu mendo'akan,

memberi semangat dan motivasi yang tiada henti kepada penulis, menyayangi dan membimbing penulis hingga akhirnya berada di tahap sekarang ini,

9. Ucapan kasih sayang kepada sahabat-sahabatku, rekan rekanku yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang selalu memberi motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Atas semua bantuan yang telah diberikan, penulis hanya dapat memanjatkan do'a kepada Allah Swt, semoga semua pihak yang telah memberikan bantuan dalam penyelesaian skripsi ini senantiasa berada dalam lindungan-Nya dan seluruh bantuannya bernilai ibadah di sisi-Nya.

Aamiin Ya Robbal 'Alamiin....

Makassar, 26 Muharram 1440 H
06 Oktober 2018 M

Penulis

S A R M I N

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
PENGESAHAN SKRIPSI	ii
BERITA ACARA MUNAQASYAH	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
MOTTO	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan & Manfaat Penelitian	10
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Kemiskinan	12
B. Kemandirian dalam Pemberdayaan Masyarakat	21
C. Desa dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)	34
D. Kerangka Pikir	52
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	54
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	54
C. Fokus dan Deskriptif Fokus Penelitian	55
D. Sumber Data	56
E. Instrumen Penelitian	57
F. Teknik Pengumpulan Data	58

G. Metode Analisis Data	60
BAB IV PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Deskripsi Hasil Penelitian	62
B. Pembahasan	80
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	98
B. Saran	98
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	
RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1	Data Kemiskinan di Sulawesi Selatan 4
Tabel 1.2	Data Kemiskinan Perkecamatan Kabupaten Gowa..... 5
Tabel 4.1	Jumlah Penduduk Desa Bissoloro 65
Tabel 4.2	Mata Pencaharian Penduduk Desa Bissoloro 66
Tabel 4.3	Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan 67

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Pikir	51
Gambar 4.1 Peta Wilayah Desa Bissoloro	67
Gambar 4.2 Struktur Organisasi BUMDES Abulo Sibatang	74
Gambar 4.3 Model Skema Penanggulangan Kemiskinan Dengan Pemberdayaan	87
Gambar 4.4 Photo Usaha Milik Desa Pertamina	94

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bangsa Indonesia sedang giat-giatnya melaksanakan pembangunan nasional di segala bidang, dimana pembangunan tersebut merupakan upaya untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat. Tujuan nasional bangsa Indonesia seperti termaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea IV yaitu “Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.¹

Guna memperlancar program pembangunan daerah, pemerintah menetapkan dasar hukum yang diterapkan pada setiap pemerintah daerah yaitu Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemertintah Daerah, dan hak otonomi pemerintah daerah untuk mengatur daerahnya sendiri. Seiring dalam pelaksanaanya pemerintah juga mengeluarkan dasar hukum yang ditetapkan pada Undang-Undang No 33 Tahun 2004 tentang Penimbangan Keuangan Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah dimana dengan pemanfaatan ekonomi dan potensi masyarakat yang ada diharapkan pemerintah mampu menjalankan tujuan dari suatu program pembangunan daerah yaitu untuk mensejahterakan masyarakat.

¹ *Undang-Undang 1945 dan Amandemen*, (Sumatera Utara: 2013), h. 25

Pemanfaatan ekonomi yang maksimal mampu meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi layak. Namun dalam meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi yang perlu di pertimbangkan yaitu tingkat investasi masyarakat pada umumnya. Sedangkan tingkat investasi dipengaruhi juga dalam segi pendapatan seseorang. Rendahnya pendapatan seseorang menjadikan kendala dalam peningkatan laju pertumbuhan ekonomi bangsa. Sehingga dengan demikian permasalahan utama dalam proses pembangunan yang didalamnya meliputi peningkatan laju pertumbuhan ekonomi yaitu masalah kemiskinan.²

Dalam konteks penjelasan pandangan al-Quran tentang kemiskinan ditemukan sekian banyak ayat-ayat al-Quran yang memuji kecukupan, bahkan al-Quran menganjurkan untuk memperoleh kelebihan. Allah SWT berfirman :

يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ ﴿١٠٠﴾

Terjemahnya:

Senantiasa bertasbih kepada Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Raja, Yang Maha Suci, Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.³

Tiadalah didunia ini yang diciptakan oleh Tuhan sebagai makhluk yang miskin. Tuhan yang menciptakan maka Tuhan pula yang menjamin rizqi bagi makhluk-Nya dari arah manapun yang Dia kehendaki. Sejatinnya yang membuat miskin adalah dirinya sendiri yaitu dengan berdiam diri dan

² Undang-Undang No 32 Tahun 2004, tentang *Pemertintah Daerah*

³ Depag RI. 2005. *Alqur'an dan Terjemahan*. QS al-Jum'ah: 1. Bandung : Syamil Al-Qur'an.

tidak memanfaatkan sebaik-baiknya apa yang mereka miliki. Tuhan menciptakan manusia dengan anggota tubuh untuk dipergunakan sebaik mungkin, mencari karunia-Nya di waktu siang hari dan beribadah kepada-Nya di waktu malam hari tiba. Beberapa ayat Al-Qur'an juga menunjukkan bahwa rizqi yang di berikan oleh Tuhan itu harus dicari (*wabtaghi*) bukan datang dengan sendirinya.

Kemiskinan merupakan fenomena Nasional dan global yang sangat memprihatinkan. Bagaimana tidak, dari tahun ke tahun masalah kemiskinan ini tidak kunjung surut bahkan cenderung meningkat seiring dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat serta menurunnya kondisi perekonomian negara Indonesia. Kemiskinan adalah kondisi seseorang atau kelompok orang, laki-laki dan perempuan yang tidak terpenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat.⁴

Kemiskinan sebagai suatu keadaan dimana seseorang tidak sanggup memelihara dirinya sendiri sesuai dengan taraf kehidupan kelompok dan juga tidak mampu memanfaatkan tenaga mental, maupun fisiknya dalam kelompok tersebut.⁵

Kondisi masyarakat miskin yang masih berada pada garis kemiskinan mencakup mereka yang berpendapatan rendah, tidak berpendapatan tetap atau tidak berpendapatan sama sekali. Dengan demikian maka penanggulangan kemiskinan yang diupayakan berbagai pihak diharapkan dapat mengangkat dan meningkatkan taraf hidup masyarakat miskin. Untuk menanggulangi kemiskinan dan sekaligus

⁴ Wardan, Anang Solihin. Peduli Kemiskinan. Bandung: PT Rmaja Rosdakarya. 2009.

⁵ Soekanto, Soerjono, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), h. 320.

memeratakan pembangunan dan hasil-hasilnya, diperlukan suatu upaya memadukan berbagai kebijaksanaan dan program pembangunan yang tersebar diberbagai sektor dan wilayah dengan memperhatikan tantangan, modal dan potensi yang ada.⁶

Angka kemiskinan khususnya di daerah Sulawesi selatan cukup tinggi hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut⁷ :

Tabel 1.1 Data Kemiskinan di Sulawesi Selatan

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk Miskin (000)	Persentase Penduduk Miskin	P ₁	P ₂	Garis Kemiskinan (Rp/Kap/Bulan)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Kepulauan Selayar	17,21	13,11	2,19	0,65	296 540
2	Bulukumba	33,25	8,06	1,72	0,52	274 318
3	Bantaeng	17,53	9,51	1,78	0,59	223 408
4	Jeneponto	55,32	15,49	3,25	0,96	302 113
5	Takalar	27,05	9,35	1,34	0,35	286 537
6	Gowa	61,52	8,40	1,59	0,47	316 428
7	Sinjai	22,51	9,41	1,66	0,43	240 245
8	Maros	39,02	11,41	2,46	0,79	336 579
9	Pangkajene dan Kepulauan	52,86	16,22	3,11	0,97	256 549
10	Barru	16,24	9,45	1,71	0,52	280 316
11	Bone	75,09	10,07	1,51	0,31	260 552
12	Soppeng	19,12	8,45	1,73	0,50	220 192
13	Wajo	29,46	7,47	1,12	0,30	258 821
14	Sidenreng Rappang	15,92	5,45	0,98	0,24	271 301
15	Pinrang	31,28	8,48	1,30	0,36	250 163
16	Enrekang	26,98	13,41	2,32	0,64	275 971
17	Luwu	50,58	14,35	2,32	0,61	271 804
18	Tana Toraja	28,42	12,36	2,65	0,98	251 452
19	Luwu Utara	43,75	14,36	2,29	0,60	288 081
20	Luwu Timur	21,08	7,52	1,09	0,23	277 520
21	Toraja Utara	33,02	14,57	3,76	1,34	393 478
22	Kota Makassar	66,78	4,56	0,67	0,16	347 723
23	Kota Parepare	8,02	5,73	0,82	0,19	281 951
24	Kota Palopo	15,02	8,74	1,17	0,28	261 056
Sulawesi Selatan		807,03	9,40	1,83	0,55	270 601

Sumber : BPS Kab. Gowa data Tahun 2016

⁶ Ali, Mohammad dan Asrori Mohammad. *Psikologi Remaja Perkembangan Peserta Didik*. (Jakarta : PT Bumi Aksara, 2014), h. 55-56

⁷ <http://sulsel.bps.go.id> diakses pada tanggal 06 Oktober 2018

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa angka kemiskinan untuk daerah kabupaten Gowa cukup tinggi dibandingkan dengan daerah lain yang ada di Sulawesi Selatan yang mencapai 8.400 jiwa. Sedangkan untuk setiap kecamatan itu bervariasi yang dapat dilihat pada tabel berikut⁸:

Tabel 1.2 Data Kemiskinan Perkecamatan Kabupaten Gowa

Nama Kecamatan	RK/RW	Masyarakat Miskin
Bontonompo	116	430
Bontonompo Sel	72	302
Bajeng	131	694
Bajeng Barat	68	798
Pallangga	163	784
Barombong	78	318
Somba Opu	102	738
Bontomarannu	64	278
Pattalassang	74	478
Parangloe	49	212
Manuju	57	360
Tinggimoncong	64	326
Tombolo Pao	100	458
Parigi	56	402
Bungaya	64	672
Bontolempangan	65	228
Tompobulu	94	434
Biringbulu	132	434
Total		8346

Sumber : BPS Kab. Gowa data Tahun 2016

⁸ <http://sulsel.bps.go.id> diakses pada tanggal 06 Oktober 2018

Tabel diatas menunjukkan bahwa angka kemiskinan di kecamatan Bungaya mencapai 672 Orang. Untuk daerah Bissoloro sendiri masyarakat miskin kurang lebih berjumlah 200 orang. Hal ini perlu dilakukan tindakan untuk mengurangi angka kemiskinan.

Negara mempunyai peranan langsung dalam peningkatan kesejahteraan rakyat yaitu dengan adanya upaya pemerintah untuk menanggulangi persoalan kemiskinan yang diakibatkan oleh krisis ekonomi. Program bantuan kepada masyarakat miskin diberikan dalam bentuk dana yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan yang diusulkan masyarakat dan juga untuk pendampingan teknis yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan itu. Dana bantuan P2KP merupakan dana hibah dana pinjaman yang disalurkan kepada Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) secara langsung dengan sepengetahuan konsultan yang mengelola P2KP disuatu wilayah kerja, penanggung jawab operasional kegiatan yang ditunjuk serta badan yang sudah dibentuk dalam hal ini adalah BUMDes (Badan Usaha Milik Desa).

Program P2KP bertujuan untuk mempercepat upaya penanggulangan kemiskinan melalui hal-hal sebagai berikut: 1) Penyediaan dana pinjaman untuk pengembangan kegiatan usaha produktif dan pembukaan lapangan kerja baru; 2) Penyediaan dana hibah untuk pembangunan prasarana dan sarana dasar lingkungan yang secara langsung maupun tidak langsung dapat menunjang kegiatan ekonomi produktif; 3) Peningkatan kemampuan perorangan dan keluarga miskin

melalui upaya bersama berlandaskan kemitraan, yang mampu menumbuhkan usaha-usaha baru yang bersifat produktif dengan berbasis pada usaha kelompok; 4) Penyiapan, pengembangan, dan kemampuan kelembagaan masyarakat ditingkat Kelurahan untuk dapat mengkoordinasikan dan memberdayakan masyarakat dalam melaksanakan program pembangunan dan 5) Pencegahan menurunnya kualitas lingkungan melalui upaya perbaikan prasarana dan sarana dasar lingkungan.⁹

Sasaran penerima bantuan yang bersifat umum melalui bantuan kredit modal kerja bergulir bagi upaya peningkatan pendapatan secara berkelanjutan, bantuan hibah untuk pembangunan maupun perbaikan prasarana dan sarana dasar lingkungan, bantuan penciptaan kesempatan kerja, termasuk pelatihan untuk mencapai kemampuan pengembangan usaha-usahanya.¹⁰ Tidak hanya dengan adanya bantuan yang diberikan oleh negara untuk penanggulangan kemiskinan yang ditujukan kepada masyarakat miskin untuk kesejahteraan mereka. Namun masyarakat miskin tersebut juga harus diberi pelatihan ataupun hal lain yang nantinya bisa membuat masyarakat tersebut mandiri, Tidak hanya mengandalkan bantuan dari negara saja.

Mandiri adalah sikap dan perilaku yang tidak mudah tergantung pada orang lain dalam menyelesaikan tugas-tugas Kemandirian juga

⁹ *Pedoman Umum P2KP* Tahun 1999.

¹⁰ *Ibid*

berarti kepercayaan terhadap gagasan sendiri.¹¹ Kemandirian berarti tidak adanya keraguan dalam menetapkan tujuan anda tidak dibatasi oleh ketakutan atau kegagalan.¹² Proses peningkatan kesejahteraan masyarakat, dapat diterapkan berbagai pendekatan, salah satu diantaranya adalah pemberdayaan masyarakat. Inti dari pemberdayaan adalah meliputi tiga hal yaitu pengembangan (*enabling*), memperkuat potensi atau daya (*empowerment*) serta terciptanya kemandirian.¹³

Dalam penelitian ini kemandirian yang dimaksud adalah sikap yang tertanam pada diri masyarakat Desa Bissoloro Kecamatan Bungaya Kabupaten Gowa khususnya masyarakat yang mengelolah dana desa yang ada di sana untuk dapat berdiri sendiri dan tidak bergantung pada orang lain. Kemandirian tersebut meliputi kemandirian berpikir, bertindak dan mengendalikan apa yang mereka lakukan tersebut. Kemandirian masyarakat adalah merupakan suatu kondisi yang dialami oleh masyarakat yang ditandai oleh kemampuan memikirkan, memutuskan, serta melakukan sesuatu yang dipandang tepat demi mencapai pemecahan masalah-masalah yang dihadapi dengan mempergunakan daya kemampuan yang terdiri atas kemampuan psikomotorik, kognitif, afektif, dengan pengarahan sumber daya yang dimiliki oleh lingkungan

¹¹ Aqib, Zaenal dan Sujak, *Panduan dan Aplikasi Pendidikan Karakter*, (Bandung: Yrama Widya, 2011), h. 7.

¹² Parker, Deborah K, *Menumbuhkan Kemandirian dan Harga Diri Anak*, (Jakarta : PT. Prestasi Pustakaraya, 2006), h. 228.

¹³ Purnomo, Heru, *Keefektifan Program Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM/LKM) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Miskin*, Artikel Jurnal Skripsi, (Yogyakarta: Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Yogyakarta, 2013), h. 4.

internal masyarakat tersebut. Pengembangan dan perluasan bidang pemberdayaan merupakan kebijaksanaan yang penting dalam proses memberdayakan masyarakat, pemberdayaan merupakan upaya untuk mengaktualisasikan potensi yang sudah dimiliki oleh masyarakat.

Kemiskinan muncul karena masyarakat tidak memiliki akses sarana dan prasarana dasar lingkungan yang memadai, kualitas perumahan dan pemukiman yang jauh di bawah standar kelayakan, dan mata pencaharian yang tidak menentu. Peran pemerintah sangat dibutuhkan untuk menanggulangi kemiskinan salah satunya dengan memberdayakan masyarakat. Upaya penanggulangan kemiskinan telah dilakukan dengan berbagai cara yang terwujud dalam berbagai program pembangunan, diantaranya adalah Program Pengembangan Kecamatan (PPK) dan Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP).

Untuk menangani program P2KP, ditingkat Desa oleh pemerintah dibentuk kelembagaan masyarakat yang disebut Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Dengan adanya BUMDes dapat dijadikan sebagai langkah awal untuk membuka lapangan usaha/kerja bagi masyarakat di Desa Bissoloro Kecamatan Bungaya dengan program yang diberikan yang akhirnya mampu meningkatkan taraf hidup, peningkatan pendapatan keluarga. Pemberian bantuan yang sifatnya pinjaman dan bergulir, dengan cara masyarakat di Desa Bissoloro Kecamatan Bungaya diberi pinjaman untuk dikelola bersama kelompok masyarakat yang sudah

dibentuk. Dengan tujuan menciptakan kemandirian di masyarakat Desa Bissoloro Kecamatan Bungaya Kabupaten Gowa.¹⁴

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait dengan pemberdayaan masyarakat berbasis kemandirian dengan judul : “Analisis Peran Badan Usaha Milik Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kemandirian di Desa Bissoloro Kecamatan Bungaya Kabupaten Gowa”.

B. Rumusan Masalah

Mengacu pada latar belakang, penelitian ini memusatkan pada suatu pokok permasalahan yang berusaha mencari jawaban atas pertanyaan yang dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kemandirian pada masyarakat di Desa Bissoloro Kecamatan Bungaya Kabupaten Gowa?
2. Bagaimana model Pemberdayaan Masyarakat berbasis kemandirian oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) pada masyarakat di Desa Bissoloro Kecamatan Bungaya Kabupaten Gowa?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan perumusan yang telah dipaparkan diatas, maka tujuan yang hendak ingin dicapai peneliti dalam penelitian ini adalah untuk :

¹⁴ *Ibid.*

1. Mengetahui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) memberdayakan masyarakat berbasis kemandirian di Desa Bissoloro Kecamatan Bungaya Kabupaten Gowa.
2. Mengetahui model pemberdayaan masyarakat berbasis kemandirian oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Bissoloro Kecamatan Bungaya Kabupaten Gowa.

Adapun manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini baik secara praktis, maupun manfaat secara teoritis adalah sebagai berikut:

1. Bagi masyarakat secara umum penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan pengetahuan tentang program kerja Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) salah satunya langkah pemberdayaan masyarakat.
2. Bagi masyarakat secara khusus penelitian ini diharapkan mewujudkan terciptanya peningkatan kesejahteraan masyarakat di Desa Bissoloro Kecamatan Bungaya, khususnya dalam bidang ekonomi.
3. Mampu memberikan masukan ilmu pengetahuan khususnya tentang strategi penganggulangan kemiskinan, pemberdayaan masyarakat dan strategi pembangunan di Indonesia.
4. Mampu memberikan masukan bagi pemerintah dalam memberdayakan masyarakat melalui program yang dilaksanakan.

BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. Kemiskinan

1. Pengertian Kemiskinan

Kemiskinan adalah manifestasi dari keadaan dan keterbelakangan masyarakat, sehingga melalui upaya-upaya pendidikan dan modernisasi, kemiskinan dan keterbelakangan akan berkurang.¹³ Kemiskinan diartikan sebagai suatu keadaan dimana seseorang tidak sanggup memelihara dirinya sendiri sesuai dengan taraf kehidupan kelompok dan juga tidak mampu memanfaatkan mental, maupun fisiknya dalam kelompok tersebut.¹⁴

Kemiskinan adalah ketidakmampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan fisik dan non fisik. Pengertian lain tentang kemiskinan adalah suatu hal yang kompleks dan karenanya tidak dapat dijelaskan dengan hanya melihat satu segi saja.¹⁵

Selanjutnya adapun yang mendefinisikan kemiskinan adalah suatu keadaan kekurangan yang absolut (tiadanya kebutuhan pokok untuk

¹³ Mubyarto, *Sistem dan Moral Ekonomi Indonesia*, (Jakarta: PT. Pustaka LP3ES Indonesia, 1988), h. 163.

¹⁴ Soekanto, Soerjono, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), h. 320.

¹⁵ Purnomo, Heru, *Keefektifan Program Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM/LKM) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Miskin*, *Artikel Jurnal Skripsi*, (Yogyakarta: Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Yogyakarta, 2013), h. 3.

bertahan hidup).¹⁶ Serta kemiskinan adalah kondisi seseorang atau kelompok orang, laki-laki dan perempuan yang tidak terpenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat.¹⁷ Kemiskinan didefinisikan bahwa kemiskinan dari segi pendapatan dalam bentuk uang ditambah dengan keuntungan-keuntungan nonmateri yang diterima oleh seseorang.¹⁸

Pendapat lain dikemukakan bahwa digambarkan sebagai kurangnya pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup pokok atau minimum yaitu sandang, papan, kesehatan dan pendidikan. Kemiskinan sebagai kekurangan dari segi kesejahteraan yang diperlukan untuk bertahan hidup dengan bermartabat. Jadi kemiskinan adalah kondisi seseorang yang tidak terpenuhi hak dasarnya (fisik dan non fisik).¹⁹

2. Klasifikasi Kemiskinan

Kemiskinan digolongkan dalam empat jenis yaitu :

- a. Kemiskinan Absolut. Merupakan tingkat ketidakberdayaan individu atau masyarakat dalam memenuhi kebutuhan minimum mulai pangan, sandang, kesehatan, perumahan dan pendidikan yang diperlukan untuk bisa hidup dan bekerja. Bank dunia mendefinisikan kemiskinan

¹⁶ Seabrook, Jeremy, *Kemiskinan Global*, (Yogyakarta: CV. Langit Aksara. 2006), h. 20.

¹⁷ Wardan, Anang Solihin, *Peduli Kemiskinan*, (Bandung: PT Rmaja Rosdakarya, 2009), h. 14.

¹⁸ Rohidi, Tjetjep Rohendi, *Ekspresi Seni Orang Miskin*, (Bandung: Yayasan Adikarya IKAPI dan The Ford Foundation, 2000), h. 24.

¹⁹ Nareswari, Angkepranita Dhyan, *Proyeksi Kemiskinan Provinsi Jawa Tengah, Skripsi*, (Semarang: Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNDIP 2014), h. 19.

absolut adalah mereka yang hidup dengan pendapatan dibawah USD \$1 per hari.

- b. Kemiskinan Relatif. Terkait dengan kesenjangan distribusi pendapatan dengan rata-rata distribusi, dimana pendapatannya berada pada posisi di atas garis kemiskinan, namun relatif lebih rendah dibanding pendapatannya masyarakat sekitarnya.
- c. Kemiskinan Struktural. Adalah kondisi miskin yang disebabkan kebijakan pemerintahan dalam pembangunan yang belum menjangkau seluruh, masyarakat sehingga menyebabkan kesenjangan pendapatan.
- d. Kemiskinan Kultural. Terkait dengan faktor sikap individu atau masyarakat yang disebabkan oleh faktor budaya, seperti malas, boros, tidak kreatif sehingga menyebabkan miskin.²⁰

Sementara itu, adapun yang mengklasifikasikan konsep kemiskinan terdapat tiga macam, yaitu: kemiskinan absolut, kemiskinan relatif, dan kemiskinan subyektif. Konsep kemiskinan absolut dirumuskan dengan membuat ukuran tertentu yang konkret (*a fixed yardstick*). Ukuran itu lazimnya berorientasi pada kebutuhan hidup dasar minimum anggota masyarakat (sandang, pangan dan papan). Masing-masing negara mempunyai batasan kemiskinan absolut yang berbeda-beda sebab kebutuhan hidup dasar masyarakat yang dipergunakan sebagai acuan memang berlainan. Karena ukurannya dipastikan, konsep kemiskinan ini

²⁰ Anwas, Oos M, *Pemberdayaan Masyarakat di Era Global*, (Bandung: Alfabeta. 2013), h. 75.

mengenal garis batas kemiskinan. Pernah ada gagasan yang ingin memasukkan pula kebutuhan dasar (*basic cultural needs*) seperti pendidikan keamanan, rekreasi, dan sebagainya, di samping kebutuhan fisik.²¹

Konsep kemiskinan relatif dirumuskan berdasarkan *the idea of relative standard*, yaitu dengan memperhatikan dimensi tempat dan waktu. Dasar asumsinya adalah kemiskinan disuatu daerah berbeda dengan daerah lainnya, dan kemiskinan pada waktu tertentu berbeda dengan waktu yang lain. Konsep kemiskinan semacam ini lazimnya diukur berdasarkan pertimbangan (*in terms of judgment*) anggota masyarakat tertentu, dengan berorientasi pada derajat kelayakan hidup.²² Sedangkan konsep kemiskinan subyektif dirumuskan berdasarkan perasaan kelompok miskin itu sendiri. Konsep ini tidak mengenal *a fixed yard stick*, dan tidak memperhitungkan *the idea of relative standard*.

Kelompok yang menurut ukuran kita berada di bawah garis kemiskinan, boleh jadi tidak menganggap dirinya sendiri miskin (dan demikian pula sebaliknya). Dan kelompok yang dalam perasaan kita tergolong hidup dalam kondisi tidak layak, boleh jadi tidak menganggap dirinya sendiri semacam itu (dan demikian pula sebaliknya). Karena itu, konsep kemiskinan semacam ini dianggap lebih tepat apabila dipergunakan untuk memahami kemiskinan dan merumuskan cara atau

²¹ Usman, Sunyoto, *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), h. 126.

²² *Ibid.*

strategi yang efektif untuk penanggulangannya. Sedangkan terkait dimensi kemiskinan, terdapat dua macam perspektif yang lazim dipergunakan untuk mendekati masalah kemiskinan, yaitu: *cultural perspective* dan *situational perspective*.

Perspektif kultural mendekati masalah kemiskinan pada tiga tingkat analisis: individual, keluarga dan masyarakat. Pada tingkat individual, kemiskinan ditandai dengan sifat yang lazim disebut *a strong feeling of marginality* seperti: sikap parokial, apatisme, fatalisme atau pasrah padanasib, boros, tergantung dan inferior. Pada tingkat keluarga, kemiskinan ditunjukkan dengan jumlah anggota keluarga yang besar dan *free union or consensual marriages*. Pada tingkat masyarakat, kemiskinan terutama ditunjukkan oleh tidak terintegrasinya kaum miskin dengan institusi-institusi masyarakat secara efektif.

Mereka seringkali memperoleh perlakuan sebagai obyek yang perlu digarap dari pada sebagai subyek yang perlu diberi peluang untuk berkembang. Sedangkan menurut perspektif situasional, masalah kemiskinan dilihat sebagai dampak dari sistem ekonomi yang mengutamakan akumulasi kapital dan produk-produk teknologi modern. Penetrasi kapital antara lain mengejawantah dalam program-program pembangunan yang dinilai lebih mengutamakan pertumbuhan (*growth*) dan kurang memperhatikan pemerataan hasil pembangunan. Program-program itu antara lain berbentuk intensifikasi, ekstensifikasi, dan

komersialisasi pertanian untuk menghasilkan pangan sebesar-besarnya guna memenuhi kebutuhan nasional ekspor.²³

3. Faktor-Faktor Penyebab Kemiskinan

Berdasarkan studi SMERU menunjukkan Sembilan kriteria yang menandai kemiskinan:

- a) Ketidakmampuan memenuhi kebutuhan konsumsi dasar (pangan, sandang dan papan).
- b) Ketidakmampuan untuk berusaha karena cacat fisik maupun mental.
- c) Ketidakmampuan dan ketidakberuntungan sosial (anak terlantar, wanita korban tindak kekerasan rumah tangga, janda miskin, kelompok marjinal dan terpencil).
- d) Rendahnya kualitas sumberdaya manusia (buta huruf, rendahnya pendidikan dan keterampilan, sakit-sakitan) dan keterbatasan sumber alam (tanah tidak subur, lokasi terpencil, ketiadaan infrastruktur jalan, listrik, air).
- e) Kerentanan terhadap guncangan yang bersifat individual (rendahnya pendapatan dan aset), maupun misal (rendahnya modal sosial, ketiadaan fasilitas umum).
- f) Ketiadaan akses terhadap lapangan kerja dan mata pencaharian yang memadai dan berkesinambungan.

²³ *Loc. It*, h. 128.

- g) Ketiadaan jaminan masa depan (karena tiadanya investasi untuk pendidikan dan keluarga atau tidak adanya perlindungan sosial dari negara dan masyarakat).
- h) Ketidakterlibatan dalam kegiatan sosial masyarakat.²⁴

4. Penyebab Utama Kemiskinan

Ada empat penyebab kemiskinan, yaitu:

- a) Tidak adanya akses ke pasar kerja. Lapangan kerja dan kesempatan kerja harus menjadi prioritas untuk mengentaskan kemiskinan. Langsung atau tidak langsung orang yang tidak memiliki pekerjaan tentunya tidak memperoleh pendapatan.
- b) Kemiskinan bisa diakibatkan oleh kerusakan lingkungan atau hilangnya habitat. Kerusakan lingkungan dan sempitnya lahan mengakibatkan terganggunya lahan pertanian.
- c) Pelayanan sosial yang tidak memadai. Pelayanan sosial ini berupa layanan pendidikan, layanan kesehatan, dan layanan publik lainnya.
- d) Tidak diikuti sertakannya dalam proses kebijakan.²⁵

Secara konseptual, kemiskinan bisa diakibatkan oleh empat faktor, yaitu:

- a) Faktor Individual. Terkait dengan aspek patologis, termasuk kondisi fisik dan psikologis si miskin.
- b) Faktor Sosial. Kondisi-kondisi lingkungan sosial yang menjebak seseorang menjadi miskin.

²⁴ Suharto, Edi, *Kemiskinan dan Perlindungan Sosial di Indonesia*, (Bandung : Alfabeta, 2009), h. 16.

²⁵ Suharto, Edi, *Op. cit*, h. 15-16.

- c) Faktor Kultural. Kondisi atau kualitas budaya yang menyebabkan kemiskinan. Faktor ini sering menunjuk pada konsep “kemiskinan kultural” atau “budaya kemiskinan” yang menghubungkan kemiskinan dengan kebiasaan hidup atau mentalitas.
- d) Faktor Struktural. Menunjuk pada struktur atau sistem yang tidak adil, tidak sensitif dan tidak *accessible* sehingga menyebabkan seseorang atau sekelompok orang menjadi miskin.²⁶

5. Kriteria Masyarakat Miskin di Indonesia

Terdapat berbagai macam indikator-indikator yang dijadikan patokan dalam kriteria masyarakat tergolong miskin di Indonesia. Indikator kemiskinan bahwa indikator ukuran miskin meliputi terbatasnya kecukupan dan mutu pangan, terbatasnya akses dan mutu pelayanan kesehatan dan pendidikan, terbatasnya akses terhadap air bersih, lemahnya kepastian kepemilikan penguasaan tanah, dan sebagainya.²⁷

Badan Pusat Statistik menentukan indikator-indikator kemiskinan, yaitu:

- a) Luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8 m² per orang.
- b) Jenis lantai bangunan tempat tinggal terbuat dari tanah/bambu/kayu murahan
- c) Jenis dinding tempat tinggal terbuat dari bamboo/rumbia/kayu berkualitas rendah/tembok tanpa plester.

²⁶ Suharto, Edi, *Op. cit*, h. 18.

²⁷ Suharto, Edi, *Op. cit*, h. 23.

- d) Tidak memiliki fasilitas buang air besar atau bersama-sama dengan rumah tangga lain.
- e) Sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik.
- f) Sumber air minum berasal dari sumur/mata air tidak terlindung sungai/air hujan.
- g) Bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu bakar/arang/minyak tanah.
- h) Hanya mengkonsumsi daging/susu/ayam satu kali dalam seminggu.
- i) Hanya membeli satu stel pakaian baru dalam setahun.
- j) Hanya sanggup makan sebanyak satu/dua kali dalam sehari.
- k) Tidak sanggup membayar biaya pengobatan di Puskesmas/Poliklinik.
- l) Sumber penghasilan kepala rumah tangga adalah petani dengan luas lahan 0,5 Ha, buruh tani, nelayan, buruh perkebunan atau pekerjaan lainnya dengan pendapatan di bawah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).
- m) Pendidikan tertinggi kepala rumah tangga adalah tidak sekolah/tidak tamat SD/hanya SD.
- n) Tidak memiliki tabungan/barang yang mudah dijual dengan nilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) seperti sepeda motor (kredit/non kredit), emas, ternak, kapal motor atau barang modal lainnya.

Masyarakat miskin juga dapat dikelompokkan menjadi tiga kelompok, yaitu golongan miskin sekali (fakir miskin), miskin dan hampir miskin (rentan terjadi miskin). Untuk masyarakat golongan fakir miskin

pemerintah sudah melakukan kegiatan-kegiatan seperti bantuan Raskin, Bantuan Langsung Tunai (BLT), beasiswa, Jamkesmas dan sebagainya. Dalam realisasinya, bantuan tersebut ternyata tidak mudah. Masyarakat lebih suka mengaku sebagai fakir miskin dengan harapan mendapat berbagai bantuan gratisan tersebut. Akibatnya sifat ketergantungan semakin meningkat.²⁸

6. Solusi Menanggulangi Kemiskinan

Pemerintah mempunyai solusi untuk menanggulangi kemiskinan, yaitu:

- a) Penyaluran bantuan langsung dalam bentuk seperti BLT, Raskin, dana BOS, Jamkesmas (Askeskin), Program Keluarga Harapan (PKH), obat murah dan banyak lagi yang lainnya.
- b) Program pemberdayaan masyarakat kecamatan dan desa di daerah tertinggal dan daerah khusus. Pemberdayaan ini mencakup berbagai aspek: pendidikan, jalan, jembatan, dan sebagainya.
- c) Pemberian pinjaman bagi masyarakat yang bergerak dalam usaha mikro, kecil, dan menengah juga koperasi.²⁹

B. Kemandirian dalam Pemberdayaan Masyarakat

1. Pengertian Pemberdayaan

Konsep pemberdayaan berkembang dari realitas individu atau masyarakat yang tidak berdaya atau pihak yang lemah (*powerless*). Ketidakberdayaan atau memiliki kelemahan dalam aspek: pengetahuan,

²⁸ Anwas, *Op. cit*, h. 85.

²⁹ Wardan, *Op. cit*, h. 17

pengalaman, sikap, keterampilan, modal usaha, *networking*, semangat, kerja keras, ketekunan, dan lainnya. Kelemahan dalam aspek tersebut mengakibatkan ketergantungan, ketidakberdayaan, dan kemiskinan.

Pemberdayaan adalah suatu proses untuk memberikan daya/kekuasaan (*power*) kepada pihak yang lemah (*powerless*), dan mengurangi kekuasaan (*disempowered*) kepada pihak yangterlalu berkuasa (*powerful*). Sedangkan pemberdayaan adalah suatu cara dengan mana rakyat, organisasi dan komunitas diarahkan agar mampu mang-uasai atau berkuasa atas kehidupannya. Pengertian pemberdayaan tersebut menekankan pada aspek pendelegasian kekuasaan, memberi wewenang, atau pengalihan kekuasaan kepada individu atau masyarakat sehingga mampu mengatur diri dan lingkungannya sesuai dengan keinginan, potensi, dan kemampuan yang dimilikinya. Pemberdayaan tidak sekedar memberikan kewenangan atau kekuasaan kepada pihak yang lemah saja. Dalam pemberdayaan terkandung makna proses pendidikan dalam meningkatkan kualitas individu, kelompokatau masyarakat sehingga mampu berdaya, memiliki daya saing serta mampu hidup mandiri.³⁰

Pengertian pemberdayaan menekankan bahwa orang memperoleh keterampilan, pengetahuan dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya. Menekankan bahwa hakikat pemberdayaan adalah

³⁰ Anwas, *Op. cit*, h. 49.

bagaimana membuat masyarakat mampu membangun dirinya dan memperbaiki kehidupannya sendiri. Istilah mampu di sini mengandung makna: berdaya, paham, termotivasi, memiliki kesempatan, melihat dan memanfaatkan peluang, berenergi, mampu bekerjasama, tahu sebagai alternatif, mampu mengambil keputusan, berani mengambil risiko, mampu mencari dan menangkap informasi serta mampu bertindak sesuai inisiatif.³¹

Dalam pelaksanaannya, pemberdayaan memiliki makna dorongan atau motivasi, bimbingan, atau pendampingan dalam meningkatkan kemampuan individu atau masyarakat untuk mampu mandiri. Upaya tersebut merupakan sebuah tahapan dari proses pemberdayaan dalam mengubah perilaku, mengubah kebiasaan lama menuju perilaku baru yang lebih baik, dalam meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraannya. Pemberdayaan juga dapat dipandang sebagai upaya meningkatkan harkat dan martabat individu dan masyarakat. Dengan demikian pemberdayaan merupakan proses meningkatkan kemampuan individu atau masyarakat untuk berdaya yang dilakukan secara demokratis agar mampu membangun diri dan lingkungannya dalam meningkatkan kualitas kehidupannya sehingga mampu hidup mandiri dan sejahtera.

³¹ *Ibid.*

2. Pemberdayaan dalam Pengentasan Kemiskinan

Strategi pengentasan kemiskinan dapat dilakukan melalui: penguatan untuk memberdayakan, dan kegiatan pemberdayaan. Kemiskinan sejak zaman dahulu hingga sekarang belum bisa terpecahkan secara tuntas. Menyadari sangat kompleksnya masalah dan faktor penyebab kemiskinan, maka pengentasan kemiskinan tidak bisa dipecahkan dari aspek ekonomi saja.

Penuntasan kemiskinan menuju keluarga sejahtera perlu memasukkan variabel non ekonomi. Hal ini disebabkan karena penuntasan kemiskinan tidak sekedar meningkatkan pendapatan, tetapi perlu dilakukan secara holistik yang menyangkut aspek kehidupan dasar manusia. Penyebab kemiskinan hakikatnya adalah melekat dalam diri individu atau sosial yang bersangkutan. Masalah kemiskinan sangat terkait dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia.³² Karena itu, pengentasan kemiskinan adalah bagaimana meningkatkan kualitas sumberdaya manusia sehingga mereka mampu berdaya, berdiri diatas kakinya sendiri, autonomi atau memiliki daya tawar dan daya saing untuk mampu hidup mandiri.³³

Pemberdayaan dalam menuntaskan kemiskinan dapat dilakukan dengan cara mengubah *mind set* individu dan masyarakat untuk berdaya dan mandiri. Pemberdayaan juga dapat dilakukan melalui berbagai aktivitas yang dapat meningkatkan partisipasi individu dan masyarakat.

³² Anwas, *Op. cit*, h. 85.

³³ *Loc. It*, h. 85-86.

Bentuk aktivitas pemberdayaan tersebut diantaranya: kegiatan pendidikan dan latihan yang dapat mendorong kemampuan dan keterampilan yang sesuai dengan potensi dan kebutuhan masyarakat, kegiatan pendampingan yang dilakukan secara berkelanjutan, menumbuhkan lembaga-lembaga non formal dalam masyarakat, menciptakan berbagai kesempatan kerja, menghidupkan kembali budaya dan kearifan-kearifan lokal sebagai modal sosial, dan bentuk aktifitas lainnya.³⁴

Program pengentasan kemiskinan dijalankan dalam tiga bentuk *cluster* :

- a) Bantuan langsung masyarakat yang sangat miskin. Bantuan langsung ini tersebar dalam bentuk bantuan pendidikan, bantuan kesehatan, bantuan pertanian, dan bantuan masyarakat pesisir.
- b) Program pemberdayaan masyarakat untuk mendapatkan dan untuk menggiatkan masyarakat sehingga memperoleh penghasilan yang layak.
- c) Bantuan yang berupa pemberian pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR).³⁵

3. Dimensi Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan mencakup tiga dimensi yang meliputi kompetensi kerakyatan, kompetensi sosiopolitik, dan kompetensi partisipatif. Tiga dimensi pemberdayaan yang merujuk pada :

³⁴ *Ibid.*

³⁵ Wardan, *Op.cit*, h. 23.

- a) Sebuah proses pembangunan yang bermula dari pertumbuhan individual yang kemudian berkembang menjadi sebuah perubahan sosial yang lebih besar.
- b) Sebuah keadaan psikologis yang ditandai oleh rasa percaya diri, berguna dan mampu mengendalikan diri dan orang lain.
- c) Pembebasan yang dihasilkan dari sebuah gerakan sosial, yang dimulai dari pendidikan dan politisasi orang-orang lemah dan kemudian melibatkan upaya-upaya kolektif dari orang-orang lemah tersebut untuk memperoleh kekuasaan dan mengubah struktur-struktur yang masih menekan.³⁶

4. Strategi Pemberdayaan

Keberhasilan pemberdayaan tidak sekedar menekankan pada hasil, tetapi juga pada prosesnya melalui tingkat partisipasi yang tinggi, yang berbasis pada kebutuhan dan potensi masyarakat. Untuk meraih keberhasilan itu, agen pemberdayaan dapat melakukan pendekatan *bottom-up*, dengan cara menggali potensi, masalah dan kebutuhan masyarakat.

Dalam melaksanakan pemberdayaan perlu dilakukan melalui berbagai pendekatan. Penerapan pendekatan pemberdayaan dapat dilakukan melalui 5P yaitu: pemungkinan, penguatan, perlindungan, penyokongan, dan pemeliharaan, dengan penjelasan sebagai berikut.

³⁶ Suharto, *Op.cit*, h. 63.

- a) Pemungkiman; menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang secara optimal. Pemberdayaan harus mampu membebaskan masyarakat dari sekat-sekat kultural dan struktur yang menghambat.
- b) Penguatan; memperkuat pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki masyarakat dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Pemberdayaan harus mampu menumbuhkembangkan segenap kemampuan dan kepercayaan diri masyarakat yang menunjang kemandirian mereka.
- c) Perlindungan; melindungi masyarakat terutama kelompok-kelompok lemah agar tidak tertindas oleh kelompok kuat, menghindari terjadinya persaingan yang tidak seimbang (apalagi tidak sehat) antara yang kuat dan lemah, dan mencegah terjadinya eksploitasi kelompok kuat terhadap kelompok lemah. Pemberdayaan harus diarahkan kepada penghapusan segala jenis diskriminasi dan dominasi yang tidak menguntungkan rakyat kecil.
- d) Penyokongan; memberikan bimbingan dan dukungan agar masyarakat mampu menjalankan perannya dan tugas-tugas kehidupannya. Pemberdayaan harus mampu menyokong masyarakat agar tidak terjatuh ke dalam keadaan dan posisi yang semakin lemah dan terpinggirkan.
- e) Pemeliharaan; memelihara kondisi yang kondusif agar tetap terjadi keseimbangan distribusi kekuasaan antara berbagai kelompok dalam

masyarakat. Pemberdayaan harus mampu menjamin keselarasan dan keseimbangan yang memungkinkan setiap orang memperoleh kesempatan berusaha.³⁷

Dalam konteks pekerjaan sosial pemberdayaan dapat dilakukan melalui tiga aras pemberdayaan (*empowerment setting*): mikro, mezzo dan makro.

- a) Aras mikro. Pemberdayaan dilakukan terhadap klien secara individu melalui bimbingan, konseling, *stress management*, *crisis intervention*. Tujuan utamanya adalah membimbing atau melatih klien dalam menjalankan tugas-tugas kehidupannya. Model ini sering disebut sebagai pendekatan yang berpusat pada tugas (*task centered approach*).
- b) Aras mezzo. Pemberdayaan dilakukan terhadap sekelompok klien. Pemberdayaan dilakukan dengan menggunakan kelompok sebagai media intervensi. Pendidikan dan pelatihan, dinamika kelompok, biasanya digunakan sebagai strategi dalam meningkatkan kesadaran, pengetahuan, keterampilan dan sikap-sikap klien agar memiliki kemampuan memecahkan permasalahan yang dihadapinya.
- c) Aras Mikro. Pendekatan ini disebut juga sebagai strategi sistem besar (*large-system-strategy*), karena sasaran perubahan diarahkan pada sistem lingkungan yang lebih luas. Perumusan kebijakan, perencanaan sosial, kampanye, aksi sosial, *lobby*, dan

³⁷ Anwas, *Op.cit*, h. 88.

pengorganisasian masyarakat, manajemen konflik, adalah beberapa strategi dalam pendekatan ini. Strategi sistem besar memandang klien sebagai orang yang memiliki kompetensi untuk memahami situasi-situasi mereka sendiri, dan untuk memilih serta menentukan strategi yang tepat untuk bertindak.³⁸

5. Kemandirian dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemberdayaan

a) Partisipasi Masyarakat

Pemberdayaan adalah sebuah proses dan tujuan. Sebuah proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan. Sebagai tujuan, maka pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial; yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya.

Pengertian pemberdayaan sebagai tujuan seringkali digunakan sebagai indikator keberhasilan pemberdayaan sebagai sebuah

³⁸ Suharto, *Op.cit*, h. 66-67.

proses.³⁹ Indikator pemberdayaan mencakup empat hal, yaitu: merupakan kegiatan yang terencana dan kolektif, memperbaiki kehidupan masyarakat, prioritas bagi kelompok lemah atau kurang beruntung, serta dilakukan melalui program peningkatan kapasitas.⁴⁰

Salah satu indikator penting dalam pemberdayaan masyarakat adalah seberapa besar tingkat partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat bukan sekedar keterlibatan masyarakat dalam pembangunan saja. Partisipasi masyarakat juga bukan sekedar alat atau mobilisasi tertentu untuk mencapai tujuan individu atau kelompok tertentu. Partisipasi merupakan suatu proses dan tujuan dalam mencapai tujuan pembangunan. Partisipasi masyarakat terlibat secara aktif baik fisik maupun psikis. Partisipasi mengandung makna keterlibatan adanya kesadaran untuk berubah, terjadinya proses belajar menuju kearah perbaikan dan peningkatan kualitas kehidupan yang lebih baik.⁴¹

Pemberdayaan juga menekankan pada proses, bukan semata-mata hasil (*output*) dari proses tersebut. Karena itu, ukuran keberhasilan pemberdayaan adalah seberapa besar partisipasi atau keberdayaan yang dilakukan oleh individu atau masyarakat. Meskipun pemberdayaan masyarakat bukan semata-mata konsep ekonomi, tetapi seringkali ditujukan untuk pengentasan kemiskinan dan kesejahteraan masyarakat. Penuntasan kemiskinan tidak sekedar

³⁹ *Ibid*, h. 60.

⁴⁰ Anwas, *Op.cit*, h. 40.

⁴¹ Anwas, *Op.cit*, h. 93.

meningkatkan pendapatan, tetapi perlu dilakukan secara holistik yang menyangkut aspek kehidupan dasar manusia, seperti: gizi dan kesehatan, keter-sediaan lapangan pekerjaan, jumlah keluarga dan anggotanya, tingkat pendidikan, lingkungan, serta aspek lain yang dapat meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. Pemberdayaan juga tidak dapat di-lakukan secara parsial. Pemberdayaan perlu dilakukan secara berkesinambungan melalui tahapan-tahapan sistematis dalam mengubah perilaku dan kebiasaan masyarakat kearah yang lebih baik.⁴²

Penuntasan kemiskinan dapat dicapai dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat. Karena melalui kegiatan pemberdayaan semua potensi yang dimiliki masyarakat didorong dan ditingkatkan untuk berdaya dan melawan faktor-faktor yang menyebabkan kemiskinan.

b) Pengertian Kemandirian

Kemandirian adalah kemampuan untuk mengelola semua milik kita; tahu bagaimana mengelola waktu anda, berjalan dan berpikir secara mandiri, disertai dengan kemampuan untuk mengambil resiko dan memecahkan masalah.⁴³

Kemandirian tumbuh dan berkembang karena dua faktor yang menjadi prasarat bagi kemandirian, yaitu disiplin (aturan bertindak dan otoritas; komitmen terhadap kelompok).⁴⁴ Jadi kemandirian adalah

⁴² *Ibid.*

⁴³ Parker, Deborah K, *Menumbuhkan Kemandirian dan Harga Diri Anak*, (Jakarta: PT. Prestasi Pustakaraya, 2006), h. 226.

⁴⁴ Ali, Mohammad dan Asrori Mohammad, *Psikologi Remaja Perkembangan Peserta Didik*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2014), h. 110.

suatu kondisi dimana seseorang tidak bergantung pada suatu otoritas dan tidak memerlukan arahan serta mampu berdiri sendiri.

Dengan kemandirian, tidak ada kebutuhan untuk mendapatkan persetujuan orang lain ketika hendak melangkah atau melakukan sesuatu yang baru. Demikian juga, mereka tidak membutuhkan petunjuk yang detail dan terus menerus tentang bagaimana mencapai produk akhir.

Kemandirian berkenaan dengan tugas, dan keterampilan bagaimana mengerjakan sesuatu, bagaimana mencapai sesuatu atau bagaimana mengelola sesuatu. Namun kemandirian juga mencakup kemampuan untuk menyendiri dan memikirkan sesuatu dengan pikiran anda sendiri. Kemandirian berkenaan dengan pribadi yang mandiri, kreatif, dan mampu berdiri sendiri; memiliki kepercayaan diri dan mengurus segala sesuatu dengan diri kita sendiri. Kemandirian membantu kita untuk : 1) Aktif; 2) Mandiri; 3) Kreatif; 4) Berkompeten dan 5) Spontan.

Kemandirian berarti adanya kepercayaan terhadap gagasan-gagasan anda sendiri. Kemandirian juga berarti tidak adanya keraguan dalam menetapkan tujuan anda dan dibatasi oleh ketakutan dan kegagalan. Kita sekarang hidup dalam masyarakat yang berubah sangat cepat sehingga di masa mendatang orang yang bisa meraih kesuksesan adalah orang yang bisa menghadapi perubahan dan

memberi kontribusi terhadapnya dengan kata lain orang-orang yang bisa memperlihatkan fleksibilitas, inisiatif, dan kreativitas.

Kemandirian muncul ketika seseorang memiliki: (1) Tanggung jawab, (2) Kemandirian, (3) Pengalaman yang relevan, (4) Ruang untuk menentukan keputusan sendiri, (5) Otonomi, (6) Akal sehat, (7) Keterampilan memecahkan masalah, (8) Keterampilan praktis, dan (9) Kesehatan yang baik.⁴⁵

c) Macam Kemandirian

Kemandirian dibedakan menjadi dua, yaitu: (1) Kemandirian Aman adalah kekuatan untuk menumbuhkan cinta kasih pada dunia, kehidupan dan orang lain, sadar akan tanggung jawab bersama, dan tumbuh rasa percaya terhadap kehidupan, dan (2) Kemandirian Tak Aman adalah kekuatan kepribadian yang dinyatakan dalam perilaku menentang dunia.⁴⁶

d) Penanaman Nilai Karakter Mandiri di Lingkungan Masyarakat.

Menumbuhkan kemandirian, warga masyarakat dapat mengikuti pelatihan kewirausahaan. Pelatihan kewirausahaan adalah suatu kegiatan pelatihan yang bertujuan untuk memperbaiki dan mengembangkan sikap, tingkah laku, keterampilan, dan pengetahuan kepada peserta pelatihan sehingga dapat mandiri dalam berwirausaha. Maka melalui kegiatan pelatihan kewirausahaan diharapkan masyarakat dapat meningkatkan keahlian, pengetahuan,

⁴⁵ *Loc. It*, h. 223.

⁴⁶ *Loc. It*, h. 111.

pengalaman, atau perubahan sikap seseorang untuk dapat mandiri dalam berwirausaha sehingga dapat diaplikasikan dalam kehidupan mereka dikemudian hari.⁴⁷

Kewirausahaan merupakan kebutuhan mutlak yang harus diwujudkan karena akan mengatasi rendahnya penciptaan lapangan kerja di lingkungan masyarakat. Perlu adanya penanganan terpadu sehingga menghasilkan wirausahawan mandiri. Kewirausahaan harus ditanamkan kepada masyarakat karena boleh jadi dunia kerja berubah semakin cepat, banyak perusahaan yang tutup dan lowongan kerja semakin kecil. Bekal wirausaha ini sangat penting untuk masa mendatang. Apabila masyarakat sudah dibekali pendidikan kewirausahaan, kemandirian akan tertanam dalam diri individu dimasyarakat.⁴⁸

C. Desa dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

1. Pengertian Desa

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Desa atau yang disebut dengan nama lain, yang selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat

⁴⁷ Kurniawan, Syamsul, *Pendidikan Karakter Konsepsi & Implementasi Secara Terpadu di Lingkungan Keluarga, Sekolah, Perguruan Tinggi & Masyarakat*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), h. 210-211.

⁴⁸ *Ibid.*

setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sedangkan menurut UU No. 32 Tahun 2004 yang sekarang di ubah dengan UU No. 6 Tahun 2014 desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yuridiksi, berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat, yang diakui dan/atau dibentuk dalam sistem Pemerintahan Nasional berada di kabupaten /kota, sebagaimana yang dimaksud dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai desa, adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.⁴⁹

Maka bisa disimpulkan, desa adalah kesatuan masyarakat yang memiliki adat dan asal-usul yang sama yang diakui oleh negara dan menjalankan pemerintahannya secara otonom.

2. Pengertian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 39 Tahun 2010 BUMDes adalah usaha desa yang dibentuk/didirikan oleh

⁴⁹ UU No 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Desa

pemerintah desa yang kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat.⁵⁰

Sedangkan menurut Manikam (2010:19) Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan lembaga usaha desa yang dikelola masyarakat dan pemerintah desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa.

Dan BUMDes menurut undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, didirikan antara lain dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Desa (Padesa). Jika pendapatan asli desa dapat diperoleh dari BUMDes, maka kondisi itu akan mendorong setiap pemerintah desa untuk mendirikan badan usaha ini. Sebagai salah satu lembaga ekonomi yang beroperasi di pedesaan, BUMDes harus memiliki perbedaan dengan lembaga ekonomi lainnya. Hal ini dimaksudkan agar keberadaan dan kinerja BUMDes dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan warga desa. Disamping itu agar tidak berkembang sistem usaha kapitalis dipedesaan yang dapat mengganggu nilai-nilai kehidupan masyarakat.

Maka bisa disimpulkan bahwa BUMDes adalah sebuah badan usaha yang dikelola oleh sekelompok orang yang ditunjuk dan dipercayai oleh pemerintah desa untuk menggali potensi desa

⁵⁰ Peraturan Pemerintah Dalam Negeri No 39 Tahun 2010 tentang BUMDes

dan memajukan perekonomian desa dengan terstruktur dan termanajemen.

a) Perbedaan antara BUMDes dan lembaga ekonomi lainnya adalah:

- 1) Badan Usaha ini dimiliki oleh desa dan dikelola secara bersama;
- 2) Modal usaha bersumber dari desa (51%) dan masyarakat (49%) melalui penyertaan modal (saham atau andil);
- 3) Operasionalisasinya menggunakan falsafah bisnis yang berakar dari *local wisdom* atau budaya lokal;
- 4) Bidang usaha yang dijalankan berdasarkan pada potensi dan hasil informasi dari pasar;
- 5) Keuntungan yang diperoleh ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota (penyerta modal) dan masyarakat melalui *village policy* atau kebijakan desa;
- 6) Difasilitasi oleh pemerintah, pemerintah propinsi, pemerintah kabupaten/kota, pemerintah desa;
- 7) Pelaksanaan operasionalisasi dikontrol bersama (Pemdes, BPD dan anggota);

BUMDes sebagai suatu lembaga ekonomi modalnya usahanya dibangun atas inisiatif masyarakat dan menganut asas mandiri, ini berarti pemenuhan modal BUMDes harus bersumber dari masyarakat. Meskipun demikian tidak menutup

kemungkinan BUMDes dapat mengajukan pinjaman modal kepada pihak luar seperti kepada pemerintah desa atau kepada pihak ketiga. Hal ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan (UU No. 32 Tahun 2004 pasal 213 ayat 3)

b) Tujuan Pendirian BUMDes antara lain:

- 1) Meningkatkan perekonomian desa;
- 2) Meningkatkan pendapatan asli desa (padesa);
- 3) Meningkatkan pengelolaan potensi desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
- 4) Menjadi tulang punggung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa;

Pendirian dan pengelolaan BUMDes adalah merupakan perwujudan pengelolaan ekonomi produktif desa yang dilakukan secara kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparansi, akuntabel, dan *sustainable*. Oleh karena itu perlu upaya serius dalam menjadikan pengelolaan BUMDes tersebut berjalan efektif, efisien, proposional dan mandiri. Untuk mencapai tujuan BUMDes dilakukan dengan cara memenuhi kebutuhan (produktif dan konsumtif) masyarakat melalui pelayanan distribusi barang dan jasa yang dikelola masyarakat dan pemerintah desa. Pemenuhan kebutuhan ini diupayakan tidak memberatkan masyarakat, mengingat BUMDes akan

menjadi usaha desa yang akan paling dominan yang menggerakkan usaha desa. Lembaga ini juga dituntut dapat memberikan pelayanan kepada non anggota (diluar desa) dengan mendapatkan harga dan pelayanan yang berlaku dengan standar pasar, artinya terdapat mekanisme kelembagaan/tata aturan yang disepakati bersama sehingga tidak menimbulkan distorsi ekonomi dipedesaan yang disebabkan usaha yang dijalankan BUMDes.

BUMDes dapat berfungsi mewadahi berbagai usaha yang dikembangkan di pedesaan. Oleh karena itu didalam BUMDes dapat terdiri dari beberapa unit usaha yang berbeda-beda, ini sebagaimana yang ditunjukkan oleh struktur organisasi BUMDes yang memiliki 3 (tiga) unit usaha yakni: unit perdagangan, unit jasa keuangan, unit produksi.

c) Unit yang berada di dalam struktur organisasi BUMDes secara umum dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) yaitu:

1. Unit jasa keuangan misalnya menjalankan usaha simpan pinjam;
2. Unit usaha sektor riil/ ekonomi misalnya menjalankan usaha pertokoan atau waserda, fotocopy, sablon, *home industry*, perkebunan, pertanian, perikanan.

Sedangkan susunan kepengurusan BUMDes terdiri dari komisaris (penasehat) yang secara *ex ficio* dijabat oleh kepala

desa yang bersangkutan. Komisaris sebagai penasehat BUMDes dalam melakukan tugas-tugasnya. Komisaris mempunyai kewajiban antara lain memberikan nasihat kepada direksi dan kepala unit usaha dalam melakukan pengelolaan BUMDes, memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUMDes, serta mengawasi pelaksanaan kegiatan usaha apabila terjadi gejala menurunnya kinerja pengurusnya. Komisaris juga mempunyai kewenangan meminta penjelasan dari pengurus mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan usaha desa, dan melindungi usaha desa terhadap hal-hal yang dapat merusak kelangsungan dan citra BUMDes.

Selanjutnya kepengurusan BUMDes di bawah komisaris adalah direksi dan kepala unit usaha. Direksi dan kepala unit usaha ini mempunyai tugas antara lain mengembangkan dan membina badan usaha agar tumbuh dan berkembang menjadi lembaga yang dapat melayani kebutuhan ekonomi warga masyarakat, mengusahakan agar tetap terciptanya pelayanan ekonomi desa yang adil dan merata, memupuk usaha kerjasama lembaga-lembaga perekonomian lainnya yang ada di desa, menggali dan memanfaatkan potensi desa untuk meningkatkan pendapatan asli desa, memberikan laporan perkembangan usaha kepada masyarakat desa melalui forum

musyawarah desa minimal 2 (dua) kali dalam setiap tahun. Disamping itu juga kepala unit usaha mempunyai kewajiban menyampaikan laporan berkala setiap bulan kepada direksi yang meliputi laporan keuangan unit usaha serta progress kegiatan, kemudian oleh direksi dilaporkan kepada komisaris, yang selanjutnya wajib di ketahui oleh masyarakat dalam suatu musyawarah desa setiap 6 (enam) bulan sekali.

d) Langkah-langkah yang ditempuh dalam persiapan pendirian BUMDes antara lain sebagai berikut:

1. Mendesain struktur organisasi. BUMDes merupakan sebuah organisasi, maka diperlukan sebuah struktur organisasi yang bertujuan untuk membagi apa saja yang menjadi tugas masing- masing pengurus.
2. Menyusun job diskripsi. Hal ini penting dilakukan mengingat untuk memperjelas tugas masing-masing pengurus. Dengan demikian tugas dan tanggung jawab serta wewenang pemegang jabatan tidak terjadi duplikasi yang memungkinkan setiap pekerjaan yang terdapat di BUMDes diisi oleh orang-orang yang berkompeten dibidangnya.
3. Menetapkan sistem koordinasi. Koordinasi adalah aktifitas untuk menyatukan berbagai tujuan yang bersifat parsial ke dalam suatu tujuan yang umum. Melalui penetapan system

organisasi yang baik memungkinkan terbentuknya kerjasama antar unit usaha dan lintas desa berjalan efektif.

4. Menyusun aturan kerjasama dengan pihak ketiga. Kerjasama dengan pihak ketiga apakah menyangkut transaksi jualbeli atau simpan pinjam penting diatur secara bersama dengan Dewan Komisaris BUMDes.
5. Menyusun pedoman kerja organisasi BUMDes. Agar semua anggota BUMDes dan pihak-pihak yang berkepentingan memahami aturan kerja organisasi. Maka diperlukan untuk menyusun AD/ART BUMDes yang dijadikan rujukan pengelola dan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola BUMDes.
6. Menyusun desain sistem informasi kepada masyarakat. Sebagai lembaga ekonomi desa yang terbuka, maka BUMDes dapat menyusun informasi yang terbuka, sehingga masyarakat dapat mengetahui informasi terkait dengan kegiatan BUMDes ini secara bebas. Sehingga keberadaannya akan mendapat dukungan dari berbagai pihak.
7. Menyusun rencana usaha (Business Plan). Penyusunan rencana usaha penting untuk dibuat dalam periode 1 sampai dengan 3 tahun. Sehingga para pengelola BUMDes memiliki pedoman yang jelas apa yang akan dikerjakannya

dan dihasilkan dalam upaya mencapai tujuan yang ditetapkan dan kinerjanya menjadi terukur. Penyusunan rencana usaha dapat dibuat bersama dewan komisaris BUMDes (kepala desa).

8. Melakukan proses rekrutmen yang melibatkan masyarakat desa. Untuk menetapkan orang-orang yang nantinya akan menduduki jabatan sebagai pengurus BUMDes dapat dilakukan dengan proses musyawarah. Namun pemilihannya harus didasarkan pada kriteria tertentu. Kriteria tersebut dimaksudkan agar pemegang jabatan di BUMDes mampu menjalankan tugas- tugasnya dengan baik. Untuk itu persyaratan bagi pemegang jabatan di BUMDes penting dibentuk oleh dewan komisaris. Selanjutnya dibawa kedalam forum *rembug* desa untuk disosialisasikan dan ditawarkan kepada masyarakat. Proses selanjutnya adalah melakukan seleksi terhadap pelamar serta menetapkan orang-orang yang paling sesuai dengan kriteria yang dibuat. Di dalam pemilihan pengurus BUMDes juga tidak diperbolehkan adanya intervensi dari pemerintah desa. Hal ini penting karena untuk kepentingan serta kemajuan BUMDes dimasa depan. Sehingga BUMDes dapat berkembang sesuai dengan karakteristik, potensi serta keinginan desa setempat.

9. Menyusun sistem administrasi pembukuan. Bentuk administrasi dan pembukuan keuangan disusun dengan format yang mudah, tetapi mau menggambarkan aktivitas yang dijalankan. Hakikat dari system administrasi dan pembukuan adalah pendokumentasian informasi tertulis berkenaan dengan aktifitas BUMDes yang dapat dipertanggungjawabkan. Dan secara mudah dapat ditemukan, disediakan ketika diperlukan oleh pihakpihak yang berkepentingan.

Menetapkan sistem penggajian dan pengupahan. Agar pengelola BUMDes termotivasi dalam menjalankan tugastugasnya, maka diperlukan adanya sistem imbalan yang dirasakan bernilai. Pemberian imbalan bagi pengelola BUMDes dapat dilakukan dengan berbagai macam seperti pemberian gaji yang berarti bahwa pengelola BUMDes dapat menerima gaji setiap bulannya dengan jumlah yang tetap. Pemberian upah yang didasarkan pada sistem kerja borongan. Sehingga jumlah yang diterima dapat bervariasi tergantung dari banyak sedikitnya beban pekerjaan yang harus diselesaikan melalui cara penawaran. Pemberian insentif jika pengelola mampu mencapai target yang ditetapkan pada periode tertentu. Besarnya jumlah uang yang dapat dibayarkan kepada pengelola BUMDes juga

harus didasarkan pada tingkat keuntungan yang kemungkinan dapat dicapai. Pemberian upah pada pengelola BUMDes juga harus semenjak awal disampaikan agar mereka memiliki tanggung jawab dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Sebab pemberian imbalan merupakan ikatan bagi setiap orang untuk memenuhi kinerja yang diminta.

e) Prinsip Umum Pendirian BUMDes

- 1) Pengelolaan BUMDes harus dijalankan dengan menggunakan prinsip kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparansi, akuntabel dan *sustainable*, dengan mekanisme *member-base help* dan *self help* yang dijalankan secara professional dan mandiri. Berkenaan dengan itu, untuk membangun BUMDes maka diperlukan informasi yang akurat tentang kearifan lokal, termasuk ciri sosial budaya masyarakatnya dan juga peluang pasar dari produk (barang dan jasa) yang dihasilkan.
- 2) Badan Usaha Milik Desa sebagai badan usaha yang dibangun atas inisiatif masyarakatnya yang menganut asas mandiri, harus mengutamakan perolehan modalnya berasal dari masyarakat dan pemdes. Meskipun demikian tidak menutup kemungkinan BUMDes dapat memperoleh modal dari pihak luar, seperti dari pemerintah kabupaten atau

pihak lain. Bahkan dapat pula melakukan pinjaman kepada pihak ketiga sesuai dengan peraturan yang berlaku.

- 3) Badan Usaha Milik Desa didirikan dengan tujuan yang jelas.

Tujuan tersebut akan terealisasi diantaranya dengan cara memberikan pelayanan kebutuhan untuk usaha produktif terutama untuk kelompok miskin pedesaan, mengurangi praktek ijon rente, dan pelepasan uang, menciptakan pemerataan usaha dan meningkatkan pendapatan masyarakat desa. Hal penting lainnya adalah BUMDes harus mampu mendidik masyarakat dengan membiasakan menabung. Dengan cara yang demikian dapat mendorong pembangunan masyarakat desa secara mandiri.

- 4) Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa, diprediksikan akan tetap melibatkan pihak ketiga yang tidak saja berdampak masyarakat desa itu sendiri, tetapi masyarakat dalam cakupan yang lebih luas (kabupaten). Oleh sebab itu pendirian BUMDes yang diinisiasi oleh masyarakat harus tetap mempertimbangkan keberadaan potensi ekonomi desa yang mendukung pembayaran pajak didesa dan kepatuhan masyarakat desa terhadap kewajibannya. Kesemuanya ini menuntut keterlibatan masyarakat kabupaten.

f) Diperlukan prediksi bahwa karakteristik masyarakat desa yang perlu mendapatkan pelayanan BUMDes adalah:

- 1) Masyarakat desa yang dalam mencukupi kebutuhan hidupnya berupa pangan, sandang, papan. Sebagian besar memiliki mata pencaharian disektor pertanian dan melakukan kegiatan usaha ekonomi yang bersifat informal.
- 2) Masyarakat desa yang penghasilannya tergolong sangat rendah, dan sulit menyisihkan sebagian besar penghasilannya untuk modal pengembangan usaha selanjutnya.
- 3) Masyarakat desa, yang dalam hal tidak dapat mencukupi kebutuhan sendiri, sehingga banyak jatuh ke pengusaha yang memiliki modal yang lebih kuat.
- 4) Masyarakat desa yang dalam kegiatan usahanya cenderung diperburuk oleh sistem pemasaran yang memberikan kesempatan kepada pemilik modal untuk dapat menekan harga, sehingga mereka cenderung memeras dan menikmati sebagian besar dari hasil kerja masyarakat desa. Atas dasar prediksi tersebut, maka karakter BUMDes sesuai dengan ciri-ciri utamanya, prinsip yang mendasari mekanisme dan sistem pengelolaannya.

g) Secara Umum pendirian BUMDes dimaksudkan untuk:

1. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat (standart pelayanan minimal) agar berkembang usaha masyarakat di desa.
2. Memberdayakan desa sebagai wilayah yang otonom.
Berkenaan dengan usaha-usaha produktif bagi upaya pengentasan kemiskinan, pengangguran dan peningkatan Pendapatan Asli Desa (Padesa)
3. Meningkatkan kemandirian dan kepentingan dan kapasitas desa serta masyarakat dalam melakukan pengutan ekonomi desa.

h) Prinsip Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa

Berikut ini merupakan hal-hal yang perlu diperhatikan tentang bagaimana prinsip pengelolaan Badan Usaha Milik Desa. Hal ini penting diuraikan agar dipahami dan dipersepsikan dengan cara yang sama oleh pemerintah desa, anggota (penyerta modal), BPD, pemkab dan masyarakat. Terdapat 6 (enam) prinsip dalam mengelola BUMDes yaitu sebagai berikut ini:

1. Kooperatif. Semua komponen yang terlibat dalam BUMDes harus mampu melakukan kerjasama yang baik demi pengembangan dan kelangsungan hidup usahanya.

2. Partisipatif. Semua komponen yang terlibat dalam BUMDes harus bersedia secara sukarela atau diminta memberikan dukungan dan kontribusi yang dapat mendorong kemajuan usaha.
3. Emansipatif. Semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes, harus diperlakukan sama tanpa memandang golongan, suku dan agama.
4. Transparan. Aktivitas yang mempengaruhi terhadap kepentingan masyarakat umum harus dapat diketahui oleh segenap lapisan masyarakat dengan mudah dan terbuka.
5. Akuntabel. Seluruh kegiatan usaha harus dapat dipertanggungjawabkan secara teknis maupun administratif.
6. *Sustainable*. Kegiatan usaha harus dapat dikembangkan dan dilestarikan oleh masyarakat dalam wadah BUMDes.

Terkait dengan implementasi Alokasi Dana Desa (ADD), maka proses penguatan ekonomi desa melalui BUMDes diharapkan akan lebih berdaya. Hal ini disebabkan adanya penopang yakni dana anggaran desa yang semakin besar. Sehingga memungkinkan ketersediaan permodalan yang cukup untuk pendirian BUMDes. Jika ini berlaku sejalan maka akan terjadi peningkatan Padesa, yang selanjutnya digunakan untuk kegiatan pembangunan desa. Hal utama yang penting

dalam upaya pengutan ekonomi desa adalah memperkuat ekonomi desa (kooperatif), membangun kebersamaan/menjalin kerekatan disemua lapisan masyarakat desa. Sehingga itu menjadi daya dorong dalam upaya pengentasan kemiskinan, pengangguran dan membuka akses pasar.

i) Landasan Hukum pelaksanaan dan pendirian BUMDes:

1) Landasan Hukum.

- i. Pasal 213 UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
- ii. Pasal 78, 79, 80 dan 81 UU No. 72 tahun 2005 tentang Desa yang diubah dalam UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa
- iii. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 39 Tahun 2010 Tentang Badang Usaha Milik Desa.
- iv. Peraturan Bupati No. 84 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan BUMDes.
- v. Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 17 Februari 2006 No. 412.6/287/SJ perihal pemberdayaan lembaga keuangan mikro/usaha ekonomi masyarakat.

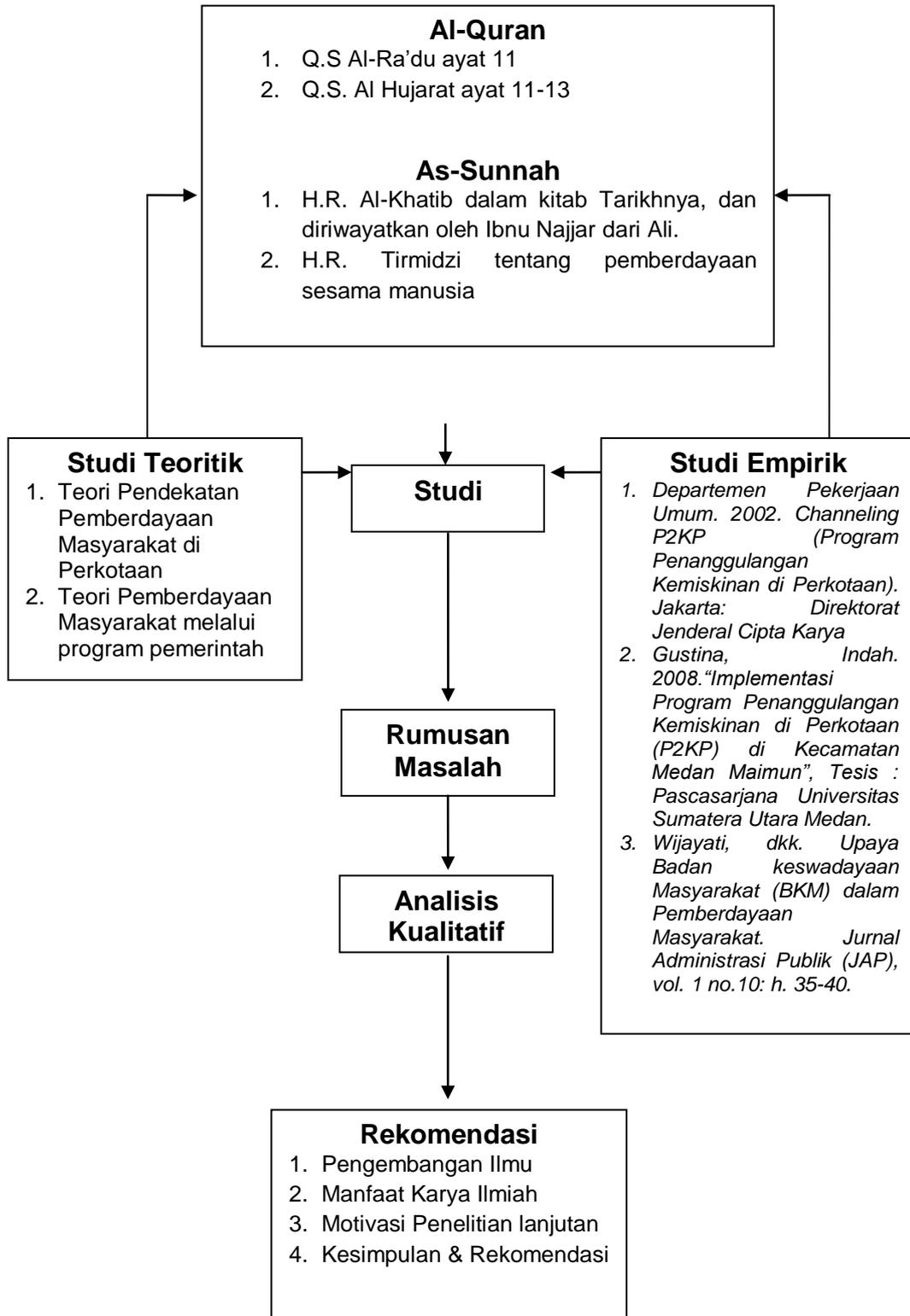
2) Landasan Filosofis.

- i. Perwujudan peningkatan pelayanan publik bagi pengembangan usaha mikro berdasarkan kebutuhan masyarakat dan potensi desa untuk kesejahteraan bersama.
- ii. Pengembangan sarana penciptaan lapangan kerja dan media pemberdayaan ekonomi kerakyatan.
- iii. Pengembangan wahana dalam penguatan basis pajak dan retribusi guna meningkatkan pendapatan asli desa

3) Landasan Kelembagaan

- i. Pemerintah desa berkewajiban melaksanakan program-program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.
- ii. Sebagai lembaga perekonomian masyarakat desa yang didirikan atas dasar inisiasi dan kearifan lokal.
- iii. Sebagai instrument peningkatan pendapatan desa dan masyarakat.

D. Kerangka Pikir



Bagan di atas dapat disimpulkan bahwa untuk mengetahui peran BUMDes dalam meningkatkan ekonomi masyarakat berbasis kemandirian di Desa Bissoloro Kecamatan Bungaya Kabupaen Gowa. BUMDes merupakan usaha yang dibuat oleh desa sebagai wadah untuk memperoleh penghasilan bagi Desa serta untuk membantu ekonomi masyarakatnya. Melalui BUMDes yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi.

Pemberdayaan Masyarakat berbasis kemandirian merupakan sebuah upaya yang dilakukan BUMDes untuk mensejahterakan kehidupan masyarakat di Desa Bissoloro Kecamatan Bungaya Kabupaten Gowa. Mandiri yang dimaksud adalah mandiri dalam pemberdayaan masyarakat melalui pemberian bantuan dana sebagai tujuan dalam pengembangan usaha mikro masyarakat di Desa Bissoloro, juga melalui program-program Desa yang pada dasarnya mempunyai tiga bidang garapan yang sering disebut Tridaya (pembangunan lingkungan/infrastruktur, peningkatan ekonomi, pemberdayaan sosial).

Diharapkan masyarakat dapat menumbuhkan sikap mandiri melalui program-program dari BUMDes. Dengan adanya kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui dana pinjaman bergulir, masyarakat Desa Bissoloro diharapkan mempunyai sikap mandiri dan BUMDes di sini sebagai badan yang menanggulangi kemiskinan dapat mendorong masyarakatnya untuk menerapkan dengan sikap mandiri tersebut.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Metode yang digunakan adalah metode kualitatif sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan dan menganalisis data secara mendalam mengenai pemberdayaan masyarakat berbasis kemandirian di Desa Bissoloro Kecamatan Bungaya Kabupaten Gowa. Berdasarkan konteks permasalahan dalam penelitian ini maka penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain metode deskriptif.

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain, secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.⁵²

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Pemilihan lokasi penelitian sangat penting dalam rangka mempertanggung jawabkan data yang diambil. Dalam penelitian ini lokasi penelitian ditetapkan pada masyarakat Desa Bissoloro Kecamatan Bungaya Kabupaten Gowa. Penetapan lokasi penelitian ini dimaksudkan

⁵² Moleong, Lexy, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT Remaja RosdaKarya. 2010), h. 6.

untuk mempermudah atau memperlancar objek yang menjadi sasaran dalam penelitian, sehingga penelitian tersebut akan terfokus pada pokok permasalahannya. Penelitian ini di rencanakan 2 (dua) bulan tahun 2018.

C. Fokus dan Deskripsi Fokus Penelitian

Dalam pandangan penelitian kualitatif, peneliti mengfokuskan pada situasi sosial yang diteliti meliputi aspek tempat (*place*), pelaku (*actor*), dan aktivitas (*activity*) yang berinteraksi secara sinergis.⁵³

Penelitian ini berfokus dalam 2 hal pokok, yaitu:

- 1) Peran BUMDes dalam pemberdayaan masyarakat berbasis kemandirian pada masyarakat Desa Bissoloro Kecamatan Bungaya Kabupaten Gowa, dalam: (a) Perencanaan BUMDes dalam memberdayakan masyarakat berbasis kemandirian, (b) Pelaksanaan BUMDes dalam pemberdayaan masyarakat berbasis kemandirian, dan (3) Evaluasi BUMDes dalam pemberdayaan masyarakat berbasis kemandirian; dan
- 2) Model Pemberdayaan masyarakat berbasis kemandirian pada masyarakat Desa Bissoloro Kecamatan Bungaya Kabupaten Gowa, meliputi: (a) Perencanaan model pemberdayaan masyarakat berbasis kemandirian, (b) Pelaksanaan model pemberdayaan berbasis kemandirian, dan (c) Evaluasi model pemberdayaan masyarakat berbasis kemandirian.

⁵³ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 285.

D. Sumber Data

Sumber data penelitian adalah subjek dari mana dapat diperoleh. Sumber data dalam penelitian ini mencakup sumber primer dan sekunder.⁵⁴

1. Data Primer. Data primer adalah data dalam bentuk verbal atau kata-kata yang diucapkan secara lisan, gerak-gerik atau perilaku yang dilakukan oleh subyek yang dapat dipercaya, dalam hal ini adalah subyek penelitian (informan) yang berkenaan dengan variabel yang diteliti.

Adapun sumber data primer dalam penelitian ini adalah: a) koordinator BUMDes, b) Kepala Desa/ Kelurahan, c) Anggota BUMdes, d) Anggota KSM (Unit Pengelola Keuangan), dan e) Masyarakat (miskin).

Penentuan informan masyarakat miskin di sini diambil berdasarkan kategori RW maju, RW menengah dan RW yang tertinggal. Dalam penelitian ini peneliti mengambil 2 sampel informan disetiap kategorinya.

2. Data Sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen grafis (tabel, catatan, notulen rapat, SMS, dan

⁵⁴ Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), h. 127.

lain-lain), foto-foto, film, rekaman video, benda-benda lain-lain yang dapat memperkaya data primer.⁵⁵

E. Instrumen Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan instrumen yaitu satu-satunya instrumen terpenting dalam penelitian kualitatif adalah peneliti itu sendiri. Peneliti mungkin menggunakan alat-alat bantu untuk mengumpulkan data seperti *tape recorder*, *video kaset*, atau *kamera*. Tetapi kegunaan atau pemanfaatan alat-alat ini sangat tergantung pada peneliti itu sendiri.

Peneliti sebagai instrumen (disebut "*Participant-Observer*") di samping memiliki kelebihan-kelebihan, juga mengandung beberapa kelemahan. Kelebihannya antara lain, pertama, peneliti dapat langsung melihat, merasakan, dan mengalami apa yang terjadi pada subjek yang ditelitinya. Dengan demikian, peneliti akan lambat laun "memahami" makna-makna apa saja yang tersembunyi di balik realita yang kasat mata (*verstehen*). Ini adalah salah satu tujuan yang hendak dicapai melalui penelitian kualitatif.

Kedua, peneliti akan mampu menentukan kapan penyimpulan data telah mencukupi, data telah jenuh, dan penelitian dihentikan. Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data tidak dibatasi oleh instrumen (misalnya kuesioner) yang sengaja membatasi penelitian pada variabel-variabel tertentu saja.

⁵⁵ Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h. 22.

Ketiga, peneliti dapat langsung melakukan pengumpulan data, menganalisisnya, melakukan refleksi secara terus menerus, dan secara gradual "membangun" pemahaman yang tuntas tentang sesuatu hal. Ingat, dalam penelitian kualitatif, peneliti memang "mengkonstruksi" realitas yang tersembunyi (*tacit*) di dalam masyarakat.⁵⁶

F. Teknik Pengumpulan Data

Adalah cara-cara yang ditempuh oleh penulis dalam rangka mendapatkan data dan informasi yang diperlukan agar sesuai dengan ciri-ciri penelitian kualitatif. Adapun cara-cara yang ditempuh dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa metode.

1. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan ini dilakukan oleh dua pihak yakni pewawancara (*Interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan pihak yang diwawancarai (*Interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.⁵⁷

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna suatu topik tertentu.⁵⁸ Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur dengan menggunakan alat bantu berupa pedoman wawancara. Model yang digunakan peneliti dalam

⁵⁶ Prasetya Irawan, *Penelitian Kualitatif*. www.web-suplemen.ut.ac.id, (diakses 27 November 2017).

⁵⁷ Arikunto, *Op. cit*, h. 186.

⁵⁸ Rachman, Maman, *Metode Penelitian Pendidikan Moral*, (Semarang: UnnesPress, 2011), h. 163.

wawancara untuk mengungkapkan data yakni dengan mengajukan pertanyaan secara langsung kepada narasumber-narasumber bagaimana peran BUMDes dalam pemberdayaan masyarakat berbasis kemandirian pada masyarakat Desa Bissoloro Kecamatan Bungaya Kabupaten Gowa. Narasumber dalam wawancara ini meliputi: (1) koordinator BUMDes; (2) anggota BUMDes; (3) kepala kelurahan/desa; (4) anggota KSM (Unit Pengelola Keuangan); (5) masyarakat (miskin).

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda dan sebagainya. Metode dokumentasi digunakan untuk mencari dan mengumpulkan data serta informasi yang tertulis dengan permasalahan penelitian. Dalam penelitian ini, metode dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data yang berkaitan dengan aspek kajian yang telah dirumuskan. Dalam penelitian ini, metode dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data yang berkaitan dengan aspek kajian yang telah dirumuskan yakni berupa dokumen dari BUMDes yang terdiri dari aktivitas, rancangan program dan sasaran.

Alat yang digunakan oleh peneliti untuk dokumentasi yaitu lembar cek lis dokumentasi dan catatan lapangan. Dokumentasi-dokumentasi yang telah diperoleh peneliti berupa foto kegiatan BUMDes di bidang ekonomi.

Selain triangulasi sumber, peneliti juga menggunakan triangulasi dengan metode, terdapat dua strategi yaitu: pengecekan derajat kepercayaan penemuan hasil penelitian beberapa teknik pengumpulan data dan pengecekan derajat kepercayaan beberapa sumber data dengan metode yang sama. Dengan cara membandingkan data hasil pengamatan, hasil wawancara juga dokumentasi yang peneliti peroleh dari hasil penelitian.

G. Teknik Analisis Data

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan menjadi hipotesis. Berdasarkan hipotesis yang dirumuskan dari data tersebut, selanjutnya dicarikan data lagi secara berulang-ulang sehingga akhirnya dapat disimpulkan apakah hipotesis tersebut diterima atau ditolak.⁵⁹ Analisis data terdiri dari 3 (tiga) alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu:

1. Reduksi data. Reduksi yaitu proses pemilihan pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan tertulis di lapangan. Dengan “reduksi data” peneliti tidak perlu mengartikannya sebagai kuantifikasi. Data kualitatif dapat disederhanakan dan ditransformasikan dalam aneka macam

⁵⁹ Rachman, Maman, *Metode Penelitian Pendidikan Moral*, (Semarang: UnnesPress, 2011), h. 173.

cara, yakni: melalui seleksi yang ketat, melalui ringkasan atau uraian singkat, menggolongkannya dalam satu pola yang lebih luas, dan sebagainya. Kadangkala dapat juga mengubah data kedalam angka-angka atau peringkat-peringkat, tetapi tindakan ini tidak selalu bijaksana. Reduksi data dilakukan peneliti dengan memilih dan memutuskan data hasil wawancara dan observasi di lapangan.

2. Penyajian data. Penyajian data adalah menyusun sekumpulan informasi yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian-penyajian data yang dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu dan mudah diraih misalnya dituangkan dalam berbagai jenis matriks, grafik, jaringan dan bagan.
3. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi. Penarikan kesimpulan adalah kegiatan mencari arti, mencatat keteraturan, pola-pola penjelasan, alur sebab-akibat dan proposisi. Kesimpulan juga diverifikasikan selama penelitian berlangsung. Verifikasi adalah penarikan kembali yang melintas dalam pikiran penganalisis selama penyimpulan, suatu tinjauan ulang pada catatan-catatan lapangan dan meminta responden yang telah dijaring datanya untuk membaca kesimpulan yang telah disimpulkan peneliti. Makna-makna yang muncul sebagai kesimpulan data teruji kebenarannya, kekokohannya, dan kecocokannya.⁶⁰

⁶⁰ Miles, Matthew B dan A, Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, Terjemahan Tjetjep Rohendi Rohidi, (Jakarta: UI Press, 1992), h. 16-17.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Desa Bissoloro

a. Kondisi Geografis

Desa Bissoloro merupakan salah satu desa dalam wilayah Kecamatan Bungaya Kabupaten Gowa. Terletak di koordinat bujur 119.613014 dan koordinat lintang -5.358165. Secara administratif, wilayah Desa Bissoloro memiliki batas sebagai berikut :

Sebelah Utara Berbatasan dengan Desa Pattallikang dan
Tana Karaeng kecamatan Manuju

Sebelah selatan Berbatasan dengan Desa Batumalonro
Kecamatan Biring Bulu

Sebelah Timur Berbatasan dengan Desa Rannaloe dan
Desa Buakkang

Sebelah Barat Berbatasan dengan Kabupaten Takalar

Dengan luas wilayah Luas Desa Bissoloro adalah $\pm 2539,32$ Ha ($27, 2$ km²) yang terdiri dari 20 % berupa pemukiman, 80 % berupa daratan yang digunakan untuk lahan pertanian, perkebunan, perhutanan. Sebagaimana wilayah tropis, Desa Bissoloro mengalami musim kemarau dan musim

penghujan dalam tiap tahunnya. Rata-rata perbandingan musim kemarau lebih besar daripada musim hujan.

Desa Bissoro sendiri terbagi menjadi 6 dusun yaitu :

- Dusun Tokka
- Dusun Parangkantisang
- Dusun Panyambeang
- Dusun Masago
- Dusun Bontorampo
- Dusun Bontotangga

Jarak pusat desa dengan ibu kota kabupaten yang dapat ditempuh melalui perjalanan darat kurang lebih 40 km. Kondisi prasarana jalan poros desa yang masih berupa jalan konstruksi lapen dengan kondisi rusak parah mengakibatkan waktu tempuh menggunakan kendaraan bermotor mencapai kurang lebih 60 menit. Sedangkan jarak pusat desa dengan ibu kota kecamatan yang dapat ditempuh melalui perjalanan darat kurang lebih 28 km. Kondisi ruas jalan poros desa yang dilalui juga berupa jalan konstruksi lapen dengan kondisi rusak parah mengakibatkan waktu tempuh menggunakan kendaraan bermotor mencapai kurang lebih 50 menit.

b. Sejarah Desa Bissoloro

Kare kanja putra dari Dampang Bulo-bulo diperintahkan untuk menjadi Kare di Bissoloro. Dalam menjalankan

pemerintahan, pada suatu ketika Sombaya ri Gowa yang ke-5 datang mengunjungi kampung tersebut, setiba dikampung tersebut Sombaya bertanya "apa namanya kampung ini?" pada saat itu kampung ini belum mempunyai nama, maka diberikanlah nama Bissoloro oleh Sombaya yang berarti Nisolori.

Bissoloro adalah sebuah kampung pejuang dan ini bisa dilihat dari sejarahnya bahwa ada tiga orang asal Bissoloro yang pernah diasingkan ke Pulau Jawa karena melakukan perlawanan terhadap Kolonial Belanda dan tidak mau diperintah oleh penjajah sehingga dijatuhi hukuman lebih dari 10 tahun penjara, namun baru menjalani empat tahun masa tahanan, Bangsa Indonesia telah merdeka yang ditandai dengan pembacaan teks proklamasi kemerdekaan RI oleh Ir. Soekarno pada tanggal 17 Agustus 1945, sehingga pada saat itu semua tawanan dibebaskan tanpa syarat termasuk ketiga orang asal Bissoloro yang kemudian dipulangkan ke Sulawesi.

Setelah Indonesia merdeka, Bissoloro adalah sebuah Dusun dari sebuah Desa yang bernama Batumalonro yang singkatan dari Baturappe, Malonjo dan Bissoloro. Pada tanggal 31 Oktober 1989 Bissoloro yang sebelumnya menjadi salah satu Dusun di Desa Batumalonro Kecamatan Bungaya sudah

menjadi Desa persiapan dibawah pimpinan Kepala Desa dari anggota TNI yang bernama La Jusman.

Pada bulan September 1994 Desa persiapan Bissoloro berubah menjadi Desa Bissoloro yang defenitif, sehingga dilakukanlah pemilihan Kepala Desa pertama sepanjang sejarah secara langsung dipilih oleh masyarakat. Adapun calon pada saat itu adalah Lajusman dan Drs. Abd. Rahman, dan yang terpilih sebagai Kepala Desa adalah Drs. Abd. Rahman yang merupakan putra asli Desa Bissoloro.

Sejak terbentuk Desa Bissoloro secara resmi, telah banyak pembangunan yang dilaksanakan dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

c. Kondisi Demografi

Demografi adalah studi ilmiah tentang penduduk, terutama tentang jumlah, struktur dan perkembangannya. Berdasarkan data profil Desa, jumlah penduduk desa Bissoloro adalah 2.342 jiwa dengan komposisi tersaji dalam tabel berikut:

Table 4.1 Jumlah Penduduk Desa Bissoloro

Jenis Kelamin	Dusun Bontotang	Dusun Bissoloro	Dusun Masago	Dusun Pannyambeang	Dusun Parangkanti	Dusun Tokka
Laki-laki	182	286	141	199	109	212
Perempuan	187	318	160	215	122	213
Jumlah	369	604	301	414	231	425
Jumlah KK	82	140	85	127	65	120

Sumber : Data Profil Desa

Bila dilihat dari tabel diatas jumlah penduduk Desa Bissoloro cukup termasuk daerah yang memiliki penduduk yang banyak, sehingga memungkinkan untuk berkembang lebih pesat dalam hal mata pencaharian penduduk. Adapun mata pencaharian masyarakat di Desa Bissoloro dapat dilihat pada tabel berikut :

Table 4.2 Mata Pencaharian Penduduk Desa Bissoloro

Mata Pencaharian	Jumlah Penduduk	Satuan
Belum Bekerja / Tidak bekerja	1.098	Jiwa
Petani	1.145	Jiwa
Pedagang	28	Jiwa
Sopir	12	Jiwa
Tenaga kontrak / honorer	31	Jiwa
PNS	17	Jiwa
LVRI	7	Jiwa
TNI	2	Jiwa
Pensiunan PNS / TNI	2	Jiwa
Lain-lain		

Sumber : Data Profil Desa

Bila dilihat dari mata pencaharian penduduk Desa Bissoloro penduduk kebanyakan menjadi petani dan banyak pula yang belum bekerja termasuk generasi-generasi muda, penduduk juga masih banyak yang belum mengenyam pendidikan secara baik, (masih banyak penduduk yang tidak bersekolah dan tidak tamat SD), hal ini dapat dilihat pada tabel:

Table 4.3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Pendidikan	Jumlah Penduduk
1. Belum Sekolah	199
2. SD / Sederajat	452
3. SMP / Sederajat	171
4. SMA / Sederajat	51
5. Diploma / Sarjana	29
6. Tidak Sekolah	153

Sumber : Data Profil Desa

d. Peta Desa Bissoloro



Gambar 4.1 Peta Wilayah Desa Bissoloro

2. Permasalahan Kemiskinan dan Potensi yang ada di Desa Bissoloro

a. Permasalahan Kemiskinan

Permasalahan kemiskinan di Desa Bissoloro dikelompokkan dalam tiga kategori :

1. Permasalahan di bidang sosial

- a) Masih terdapat rumah warga yang tidak layak huni
- b) Banyak anak yatim/piatu dan orang jompo
- c) Kurangnya pengetahuan dan kesadaran warga akan PHBS (Pola Hidup Bersih dan Sehat) sehingga banyak menimbulkan berbagai penyakit
- d) Terkadang diwaktu tertentu terdapat warga yang menderita TB, Demam Berdarah, Malaria dan Diare
- e) Banyak warga yang tidak memiliki keterampilan yang dapat menunjang kerja atau usaha
- f) Kesadaran warga akan pendidikan masih rendah.

2. Permasalahan di bidang ekonomi

- a) Kurangnya permodalan bagi masyarakat khususnya pengusaha kecil. Untuk mengatasinya banyak warga yang meminjam ke rentenir, karena akses untuk ke bank sulit dan juga prosedurnya terlalu rumit.
- b) Banyak warga yang memiliki usaha industri rumah tangga kesulitan dalam memasarkan produknya.

c) Masih banyak warga usia produktif yang menganggur. Penyebabnya adalah : rendahnya pendidikan masyarakat, tidak punya ketrampilan, tidak ada kesempatan kerja, produktifitas kurang, kurangnya motivasi untuk berwiraswasta.

3. Permasalahan di bidang lingkungan

a) Masih banyak terdapat jalan yang kurang baik (aspalnya sudah rusak maupun masih berupa jalan tanah). Hal ini disebabkan tidak adanya saluran air yang memadai disepanjang jalan dan juga jalan yang sering dilalui kendaraan bermuatan berat.

b) Saluran air masih kurang memadai dan banyak yang tererosi sehingga jika hujan airnya meluap dijalan. Hal ini disebabkan saluran yang ada tidak mampu menampung debit air karena adanya pendangkalan saluran, banyaknya warga yang membuang sampah serta dedaunan diselokan dan sempitnya lahan untuk saluran air menjadi penyebabnya.

c) Kesadaran warga untuk membuang sampah ditempatnya masih kurang. Banyak warga yang membuang sampah diselokan dan disembarang tempat

- d) Masih banyak warga yang belum mempunyai WC sehingga mereka sering Buang Air Besar di semak-semak.
- e) Masih banyak warga yang kesulitan air bersih. Kalau hujan airnya keruh dan dimusim kemarau kesulitan memperoleh air.
- f) Rumah warga yang tidak layak huni.
- g) Tidak adanya akses internet, bahkan jaringan telepon sehingga membuat orang di desa ini terlambat untuk dapat informasi dari luar.
- h) Masih banyak warga yang tidak bisa berbahasa Indonesia sehingga mempersulit aparat Desa maupun pemerintah yang berkunjung untuk penyuluhan dan sosialisasi.

b. Analisis Potensi

Analisis potensi dilakukan dengan pertimbangan kontribusi dan manfaat dari potensi Sumber Daya Manusia, Sumber Daya Alam dan Sumber Dananya.

1. Sumber Daya Manusia

- a) Terdapat tenaga pendidik di Desa bahkan disetiap Dusun.
- b) Adanya tenaga kesehatan seperti bidan dan perawat.

- c) Adanya warga yang berprofesi sebagai pengusaha dengan membuka lokasi wisata dengan objek photo yang diminati oleh generasi muda.

2. Sumber Daya Alam

- a) Memiliki lahan pertanian yang cukup luas.
- b) Terdapat banyak aliran air dari mata air pegunungan yang dapat dimanfaatkan untuk budidaya perairan.
- c) Terdapat hutan-hutan pinus yang dapat dikelola dan dikembangkan menjadi objek wisata serta pemandangan kota makassar yang dapat dilihat dari Desa Bissoloro.

3. Sumber Daya Manusia

- a) Kesadaran warga untuk berswadaya sudah cukup tinggi.
- b) Terdapat warga dari Desa Bissoloro maupun dari luar untuk menjadi Donatur.

3. BUMDes (Badan Usaha Milik Desa)

a. Profil BUMDes Abulo Sibatang Desa Bissoloro

Badan Usaha Milik Desa merupakan usaha yang didirikan oleh Pemerintah Desa yang kepemilikan dan pengelolaan modalnya dilakukan oleh pemerintah Desa dan Masyarakat. Tujuan pembentukan BUMDes tidak lain adalah untuk memperoleh Pendapatan Asli Desa (Padesa) dan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat yang diberikan modal

dalam berwirausaha guna menanggulangi kemiskinan itu sendiri.

BUMDes di Desa Bissoloro bernama BUMDes Abulo Sibatang yang dibentuk melalui musyawarah desa, dari tingkat Desa sampai dengan tingkat kecamatan, pemilihan orang-orang yang bertanggungjawab didalamnya dilakukan secara bertahap dimulai dengan tingkat basis/lingkungan sampai dengan pemilihan tingkat aparat Desa yang dipilih dari orang yang baik dilingkungannya masing-masing. Orang-orang yang berada dalam BUMDeslah yang mengawasi jalannya kegiatan-kegiatan atau program-program dari BUMDes, kegiatan tersebut meliputi kegiatan dibidang sosial, ekonomi dan lingkungan.

BUMDes Abulo Sibatang masa bakti 2016-2019 merupakan BUMDes periode pertama yang dibentuk dan disahkan oleh pemerintah ditetapkan di Bissoloro pada tanggal 29 Maret 2016 berdasarkan hasil musyawarah dengan diketuai oleh bapak Ridwan, dibantu dengan sekretaris Bapak Muh. Fahrul Sitaba dan Bendahara Ibu Nur Muhlisa.

Awalnya BUMDes Abulo Sibatang memiliki beberapa unit usaha yaitu usaha simpan pinjam, bidang pertanian, perdagangan umum, bidang peternakan dan industri rumah tangga. Namun dikarenakan kebanyakan warga yang menjadi

anggota BUMDes lebih tertarik kepada produk unit usaha simpan pinjam atau pemberian modal usaha maka BUMDes Abulo Sibatang lebih fokus kepada unit usaha pemberian bantuan modal kepada masyarakat untuk mendorong perekonomiannya.

b. Visi, Misi dan Tujuan BUMDes

1) Visi BUMDes Abulo Sibatang

Terwujudnya masyarakat Desa Bissoloro yang peduli, adil dan sejahtera.

2) Misi BUMDes Abulo Sibatang

1. Menumbuhkan semangat kebersamaan antar anggota masyarakat.
2. Memberdayakan potensi masyarakat melalui ekonomi, pendidikan, kesehatan, lingkungan dan sosial.
3. Peningkatan peran pemerintah serta lembaga kemasyarakatan yang ada dalam menunjang penanggulangan kemiskinan

3) Tujuan BUMDes Abulo Sibatang

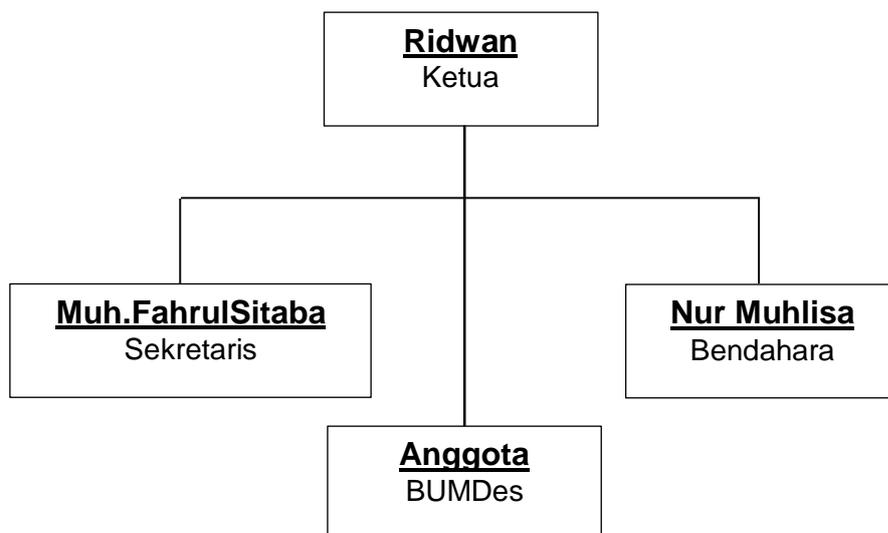
1. Mewujudkan masyarakat berdaya mandiri, yang mampu mengatasi berbagai persoalan kemiskinan diwilayahnya sejalan dengan kebijakan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat.

2. Meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dalam menerapkan model pembangunan partisipatif yang berbasis kemitraan dengan masyarakat yang peduli setempat.
3. Meningkatkan capaian manfaat bagi masyarakat miskin untuk mendorong peningkatan IPM dan MDGs.

Sumber :

c. Struktur Organisasi BUMDes Abulo Sibatang Desa Bissoloro

Gambar 4.2 Struktur Organisasi BUMDes Abulo Sibatang



Sumber : Data Primer

Dari bagan diatas dapat dilihat bahwa dalam operasional kegiatan BUMDes diawasi oleh seorang ketua dan dibantu oleh dua orang lainnya yaitu sekertaris dan bendahara, tugas mereka adalah mengawasi anggota BUMDes yang mana

anggota tersebut merupakan peminjam dari dana simpan pinjam BUMDes Abulo Sibatang.

4. Model Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Kemandirian

a. Perencanaan Model Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Kemandirian di Desa Bissoloro

Pada perencanaan model penanggulangan kemiskinan berbasis kemandirian di desa Bissoloro, pertama yang dilakukan adalah menghitung berapa jumlah penduduk miskin yang ada di Desa Bissoloro. Desa Bissoloro memang tidak begitu luas, dengan luas wilayah sekitar $\pm 2539,32$ Ha ($27, 2$ km²) yang terbagi dalam 6 dusun. Jumlah keseluruhan masyarakat per Desember 2015 terdapat 2.342 Jiwa atau 619 KK. Berdasarkan data yang peneliti peroleh jumlah penduduk miskin Desa Bissoloro terdapat 1.048 Jiwa atau 425 KK.

Masyarakat digolongkan miskin pastinya tidak lepas dari kriteria. Kriteria untuk menggolongkan masyarakat miskin itu beraneka ragam. Memperhatikan situasi dan kondisi yang ada di lapangan. Namun kriteria umumnya yang digunakan di Desa Bissoloro diantaranya: rumah yang masih beralaskan tanah, rumah panggung dengan atap dari daun, tidak mempunyai kendaraan, dan penghasilan tidak tetap. Ha tersebut penulis peroleh sewaktu melaksanakan KKP-Plus Fakultas Agama

Islam di Bissoloro dan dikuatkan dengan melakukan survei langsung ke rumah warga.

Kedua, setelah melakukan pengumpulan data perencanaan kemandirian dilanjutkan dengan meneliti latar belakang orang ataupun anggota BUMDes, apakah dia mampu untuk melakukan dan mengembangkan usahanya ataupun tidak, salah satu cara digunakan adalah dengan melihat reward dari anggota BUMDes yang mana dahulunya telah bergabung dalam program desa lainnya, hal ini sesuai di ungkapkan ketua operasional BUMDes bapak Ridwan⁵¹.

“...untuk antisipasi bahwa, pembelajaran kami kemarin di koperasi simpan pinjam perempuan PNPM, memang banyak orang yang tidak mengembalikan dana itu, tapi untuk antisipasi itu kita pengurus BUMDes sebagai warga Desa Bissoloro juga sudah paham yang mana bisa diberikan dilihat dari rewardnya dan jenis usaha si calon yang akan diberikan modal...”

Dari keterangan tersebut dapat diketahui bahwa untuk melakukan perencanaan penanggulangan kemiskinan di Desa Bissoloro diperlukan orang-orang yang ada dalam desa tersebut, sehingga dapat diketahui dengan tepat yang mana dapat diberikan bantuan penambahan modal oleh BUMDes.

- b. Pelaksanaan Model Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Kemandirian di Desa Bissoloro

⁵¹ Wawancara dengan Ridwan, Ketua BUMDes Abulo Sibatang. Tanggal 15 Mei 2018

Model penanggulangan kemiskinan berbasis kemandirian di Desa Bissoloro diterapkan sejak tahun 1998. Namun sejak adanya program dari pemerintah yakni PNPM mandiri di Desa Bissoloro melalui Badan Keswadayaan Masyarakat penanggulangan kemiskinan ini gencar digerakkan. BKM dahulu yang ada di Desa Bissoloro merupakan badan khusus yang ditunjuk untuk menerapkan model penanggulangan kemiskinan. Jadi model penanggulangan kemiskinan ini gencar dilakukan sejak BKM tersebut berdiri sampai dengan sekarang namun dengan program yang berbeda yakni BUMDes. Model-model penanggulangan kemiskinan tersebut diantaranya pemberdayaan, pelatihan-pelatihan (diantaranya pelatihan pertanian, pelatihan menjahit, dan lain-lain) dan bantuan modal pinjaman bergulir bagi masyarakat ekonomi lemah.

Pemberdayaan yang dimaksudkan di sini adalah memberdayakan orang-orang yang mempunyai potensi tetapi potensinya tidak digunakan maka pemerintah memberikan dorongan kepada mereka untuk mengembangkan potensinya. Yang tidak mempunyai *skill* juga dibantu dengan diberikan *skill*. Pada intinya penanggulangan kemiskinan yang dilakukan pemerintah Desa Bissoloro ini dilakukan dengan semaksimal mungkin. Artinya mereka yang tidak punya modal untuk usaha diberikan bantuan modal pinjaman bergulir, mereka yang tidak

mempunyai keterampilan diberikan keterampilan dengan adanya pelatihan-pelatihan dan lain sebagainya. Dengan tujuan agar mereka secara perekonomian bisa mandiri tidak ada lagi pengangguran dan tidak bergantung pada orang lain (tidak hanya menunggu uluran tangan orang lain). Seperti yang diungkapkan oleh bapak Ridwan bahwa⁵² :

“...sebenarnya sampai sekarang ini tidak ada program khusus yang BUMDes berikan kepada masyarakat, kecuali pemberian modal tapi saya selaku ketua BUMDes juga sebagai pengelola salah satu usaha BUMDes senantiasa memberikan contoh dan arahan bahwa beginilah cara melakukan usaha...”

Berdasarkan keterangan bapak Ridwan memang tidak ada program khusus yang diberikan oleh BUMDes kepada anggotanya namun pihak dari pengelola BUMDes sendiri memberikan contoh dan arahan yang baik bahwa beginilah cara melakukan usaha, sehingga warga senantiasa melakukan usaha sedangkan untuk pelatihan-pelatihan khusus sudah dilakukan pada program-program pemerintah terdahulu sesuai dengan pendapat bapak Ridwan bahwa⁵³:

“BUMDes ini bukan program yang membentuk hal baru, tapi ini adalah bentuk pengembangan yang dilakukan oleh pemerintah dari program sebelumnya, jadi BUMDes di Bissoloro itu tujuannya mengembangkan potensi yang sudah ada di masyarakat dengan memberikan modal usaha secara bergilir”

⁵² *ibid*

⁵³ *ibid*

c. Evaluasi Model Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Kemandirian di Desa Bissoloro

Badan usaha milik desa mempunyai tujuan selain memberikan bantuan modal usaha kepada masyarakat juga digunakan sebagai sarana untuk pemasukan dana bagi desa, dana-dana tersebut yang telah masuk ke Desa digunakan kembali untuk kepentingan desa semisal melakukan kegiatan-kegiatan desa, memperbaiki sarana desa dan lain-lain.

Untuk mencegah hal buruk kedepannya untuk BUMDes apabila terjadi pengembalian macet oleh anggota BUMDes karena kelalaian anggota sendiri maka pengelola BUMDes telah menyiapkan hal-hal yang dapat membantu BUMDes tetap bisa berjalan, semisal yang dilakukan adalah memberikan batasan kepada anggota dalam hal peminjaman dana, sesuai dengan perkataan dari Bendahara BUMDes Ibu Nur Muhlisa sebagai berikut⁵⁴ :

“tidak semua orang dikasih dana dilihat juga kemampuannya, jadi modal yang dikasih juga tergantung dari kemampuannya, setelah itu dibuatkan surat pernyataan dan wajib punya barang tanggungan sebagai jaminan kalo tidak bisa membayar”

Pendapat diatas dikuatkan pula oleh ketua BUMDes bapak Ridwan yang mengatakan ⁵⁵:

⁵⁴ Wawancara dengan Nur Muhlisa, Sekertaris BUMDes Abulo Sibatang, tanggal 26 Mei 2018

⁵⁵ Op.Cit

“...orang yang kami berikan bantuan pada hari ini alhamdulillah masih lancar semua tapi kita dari pengurus tetap antisipasi makanya sebelum melakukan penandatanganan surat pernyataan kami memberitahukan tentang anggunan, dan apabila warga tidak membayar maka kami akan menarik anggunan atau jaminan tersebut sampai dibayar...”

Dari pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa untuk melakukan penanggulangan kemiskinan perlu dilakukan antisipasi sehingga dapat berjalan sesuai dengan prosedur dalam hal ini pengurus dari BUMDes memberikan dana kepada masyarakat dengan adanya anggunan sebagai jaminan apabila dikemudian hari terjadi hal tak terduga semisal pembayaran macet.

B. Pembahasan

1. Kemandirian sebagai Tujuan dari Model Penanggulangan Kemiskinan di Desa Bissoloro

Dari hasil penelitian diketahui bahwa kriteria penggolongan masyarakat miskin yang digunakan di Desa Bissoloro beraneka ragam memperhatikan situasi dan kondisi di lapangan yaitu diantaranya: tidak mempunyai penghasilan tetap, tidak mempunyai kendaraan, rumah masih beralaskan tanah, rumah panggung yang sudah lapuk, rumah yang tidak layak huni, tidak mempunyai WC, makan sehari sekali, pakaian yang dikenakan tidak ada gantinya, rumah yang berdinding bambu atau dari kayu, tidak punya sumur yang permanen dan lain sebagainya merupakan kriteria yang

digunakan dalam penggolongan masyarakat miskin. Kemiskinan adalah suatu hal yang kompleks dan karenanya tidak dapat dijelaskan dengan hanya melihat satu segi saja. Kemiskinan digambarkan sebagai kurangnya pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup pokok atau minimum yaitu sandang, papan, kesehatan dan pendidikan.

Kemiskinan adalah ketidakmampuan individu dalam memenuhi kebutuhan dasar minimal untuk hidup layak. Ketidakmampuan tersebut ditunjukkan oleh kondisinya yang berada di bawah garis nilai standar kebutuhan minimum, baik untuk makanan dan non makanan.

Garis kemiskinan merupakan sejumlah rupiah yang diperlukan oleh setiap individu untuk dapat membayar kebutuhan makanan setara 2.100 kilo kalori per orang per hari, dan kebutuhan non makanan yang terdiri dari perumahan, pakaian, kesehatan, pendidikan, transportasi, serta aneka barang dan jasa lainnya. Badan Pusat Statistik (BPS) menggunakan indikator konsumsi sebesar 2.100 kalori/orang setiap hari yang disetarakan dengan pendapatan tertentu, atau pendekatan Bank Dunia yang menggunakan standar USD \$ 1 per hari. Contoh kemiskinan ini adalah tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar seperti sandang, papan dan pangan beserta akses lain seperti kesehatan, pekerjaan maupun pendidikan.

Faktor-faktor tersebut di atas salah satunya yang digunakan pemerintah Desa Bissoloro maupun BUMDes dalam mengkategorikan masyarakat miskinnya, yaitu ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar (papan, sandang, dan pangan). Masyarakat yang tidak mempunyai rumah layak huni atau lantainya masih dari tanah liat, serta dinding rumah yang terbuat dari bambu, ataupun kayu.

Berdasarkan hasil penelitian dan observasi yang telah peneliti lakukan di Desa Bissoloro penggolongan masyarakat miskin termasuk dalam kemiskinan relatif, dimana pendapatannya berada pada posisi di atas garis kemiskinan namun relatif lebih rendah dibanding pendapatan masyarakat sekitarnya. Kenapa berada di atas garis kemiskinan, karena Bank Dunia mendefinisikan mereka yang hidup dengan pendapatan di bawah USD \$1 per hari termasuk miskin. Desa Bissoloro sendiri masyarakat yang masuk dalam golongan miskin rata-rata mempunyai pendapatan Rp.20.000- – Rp.40.000,- per hari atau lebih namun dengan pendapatan sebanyak itu masih tidak cukup untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari mereka. Kenyataan di lapangan masyarakat di Desa Bissoloro masih tidak bisa mencukupi kebutuhan sandang, papan dan pangannya.

Pemerintah Bissoloro sendiri mempunyai solusi untuk menanggulangi kemiskinan, yaitu a) Penyaluran bantuan langsung

dalam bentuk seperti BLT, Raskin, dana BOS, Jamkesmas (Askeskin), Program Keluarga Harapan (PKH), obat murah dan banyak lagi yang lainnya; (b) Program pemberdayaan masyarakat kecamatan dan desa di daerah tertinggal dan daerah khusus. Pemberdayaan ini mencakup berbagai aspek: pendidikan, jalan, jembatan, dan sebagainya; (c) Pemberian pinjaman bagi masyarakat yang bergerak dalam usaha mikro, kecil, dan menengah juga koperasi.

Pemerintah sudah melakukan kegiatan untuk penanggulangan kemiskinan seperti bantuan Raskin, Bantuan Langsung Tunai, beasiswa, Jamkesmas dan sebagainya. Masyarakat miskin yang ada di Desa Bissoloro sudah banyak yang merasakan bantuan dari pemerintah tersebut. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti ibu Farida, Bapak Abd. Jalil dan Bapak Syafaruddin adakah sedikit contoh dari masyarakat miskin di Bissoloro yang mendapat bantuan Raskin dan BLT serta bantuan peminjaman modal untuk usaha. Untuk bantuan jaminan kesehatan tidak semua masyarakat miskin yang mendapatkannya. Berdasarkan penuturan masyarakat miskin yang mendapatkan bantuan jamkesmas banyak diberikan kepada janda dan duda miskin yang ada di desa tersebut. Mengingat jumlah penduduk miskin lebih banyak dan jumlah bantuan jamkesmas ini tidak mencukupi semuanya maka dari itu pemerintah lebih

mengutamakan pada mereka yang benar-benar membutuhkan, mereka yang tidak mempunyai pekerjaan.

Dari sekian banyak bantuan tersebut pemerintah berinisiatif untuk memberikan sesuatu kepada masyarakat agar masyarakat tersebut bisa hidup tanpa bantuan dari orang lain, termasuk bantuan dari pemerintah. Pemberdayaan adalah salah satu kunci membuat masyarakat untuk bisa hidup mandiri, terkait program pemberdayaan masyarakat di Desa Bissoloro juga melakukan hal demikian kepada masyarakat miskinnya. Model penanggulangan kemiskinan berbasis kemandirian yang diterapkan di Desa Bissoloro yaitu pemberdayaan. Berdasarkan hasil penelitian, pemberdayaan yang dimaksudkan di sini adalah memberdayakan orang-orang yang mempunyai potensi tetapi potensinya tidak digunakan maka pemerintah memberikan dorongan kepada mereka untuk mengembangkan potensinya. Yang tidak mempunyai *skill* juga dibantu dengan diberikan *skill*. Pada intinya penanggulangan kemiskinan yang dilakukan pemerintah Desa Bissoloro ini dilakukan dengan semaksimal mungkin. Artinya mereka yang tidak punya modal untuk usaha diberikan bantuan modal pinjaman bergulir, mereka yang tidak mempunyai keterampilan diberikan ketrampilan dengan adanya pelatihan-pelatihan dan lain sebagainya. Dengan tujuan agar mereka secara perekonomian bisa mandiri tidak ada lagi pengangguran dan tidak

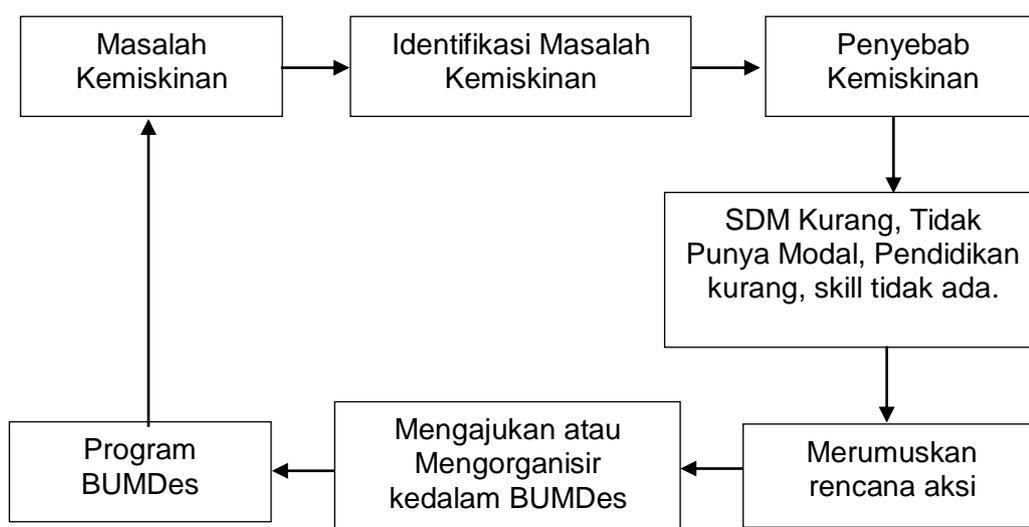
bergantung pada orang lain (tidak hanya menunggu uluran tangan orang lain).

Ketidakberdayaan atau memiliki kelemahan dalam aspek: pengetahuan, pengalaman, sikap, keterampilan, modal usaha, networking, semangat, kerja keras, ketekunan, dan aspek lainnya. Kelemahan dalam aspek tersebut mengakibatkan ketergantungan, ketidakberdayaan, dan kemiskinan. Namun keberhasilan pemberdayaan tidak sekedar menekankan pada hasil, tetapi juga pada prosesnya melalui tingkat partisipasi yang tinggi, yang berbasis pada kebutuhan dan potensi masyarakat. Untuk meraih keberhasilan itu pemberdayaan dilakukan dengan cara *bottom-up*, dengan menggali potensi, masalah dan kebutuhan masyarakat. Pengertian pemberdayaan tersebut menekankan pada aspek pendelegasian kekuasaan, memberi wewenang, atau pengalihan kekuasaan kepada individu atau masyarakat sehingga mampu mengatur diri dan lingkungannya sesuai dengan keinginan, potensi, dan kemampuan yang dimilikinya. Pemberdayaan tidak sekedar memberikan kewenangan atau kekuasaan kepada pihak yang lemah saja. Dalam pemberdayaan terkandung makna proses pendidikan dalam meningkatkan kualitas individu, kelompok atau masyarakat sehingga mampu berdaya, memiliki daya saing serta mampu hidup mandiri. Dengan demikian pemberdayaan merupakan proses meningkatkan kemampuan individu atau

masyarakat untuk berdaya yang dilakukan secara demokratis agar mampu membangun diri dan lingkungannya dalam meningkatkan kualitas kehidupannya sehingga mampu hidup mandiri dan sejahtera.

Salah satu indikator penting dalam pemberdayaan masyarakat adalah seberapa besar tingkat partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat terlibat secara aktif baik fisik maupun psikis. Partisipasi mengandung makna keterlibatan adanya kesadaran untuk berubah, terjadinya proses belajar menuju kearah perbaikan dan peningkatan kualitas kehidupan yang lebih baik. Pemberdayaan juga menekankan pada proses, bukan semata-mata hasil (*output*) dari proses tersebut. Oleh karena itu ukuran keberhasilan pemberdayaan adalah seberapa besar partisipasi atau keberadayaan yang dilakukan oleh individu atau masyarakat. Meskipun pemberdayaan masyarakat bukan semata-mata konsep ekonomi, tetapi seringkali ditujukan untuk pengentasan kemiskinan dan kesejahteraan masyarakat. Penuntasan kemiskinan tidak sekedar meningkatkan pendapatan, tetapi perlu dilakukan secara holistik yang menyangkut aspek kehidupan dasar manusia, seperti: gizi dan kesehatan, ketersediaan lapangan pekerjaan, jumlah keluarga dan anggotanya, tingkat pendidikan, lingkungan, serta aspek lain yang dapat meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat.

Pemberdayaan yang telah dilakukan BUMDes Abulo Sibatang Desa Bissoloro yaitu berawal dari masalah masyarakat miskin yang ada di Desa Bissoloro kemudian mengidentifikasi masalah melalui Pemetaan Sosial (PS) dalam identifikasi masalah tersebut mengidentifikasi siapa saja yang tergolong miskin dan miskinnya ada dimana, kemudian mengklasifikasikan kemiskinan yang ada ada di sana, menggolongkan penyebab kemiskinan (SDM kurang, tidak punya modal, pengetahuan, kesehatan atau pendidikan yang kurang). Merumuskannya dalam rencana kemudian mengorganisir kedalam BUMDes yang diawasi langsung oleh aparat desa serta pengelola BUMDes itu sendiri. Langkah yang selanjutnya yakni mengaplikasikannya dalam bentuk pemberian program penanggulangan kemiskinan yang ada di Desa Bissoloro. Skema Pemberdayaan dapat dilihat pada gambar berikut :



Gambar 4.3 Model Skema Penanggulangan Kemiskinan dengan Pemberdayaan

2. Peran BUMDes dalam Menanggulangi Kemiskinan di Desa Bissoloro

Sejak adanya program pemerintah untuk menanggulangi kemiskinan yang dimulai dari PNPM mandiri yang mengencarkan gerakan penanggulangan kemiskinan dan untuk saat ini adalah BUMDes sebagai wadah masyarakat untuk bersinergi dan menjadi lembaga kepercayaan milik masyarakat, yang diakui baik oleh masyarakat sendiri maupun pihak luar, dalam upaya masyarakat membangun kemandirian menuju tatanan masyarakat madani (civil society).

BUMDes adalah lembaga pimpinan kolektif sebagai penggerak modal sosial untuk menanggulangi kemiskinan di wilayah desa dengan tugas pokok sebagai berikut: (a) Merumuskan kebijakan serta aturan demokratis mengenai hal-hal yang berhubungan dengan penanggulangan kemiskinan; (b) Mengorganisasi masyarakat untuk merumuskan visi, misi, rencana strategis dan pronangkis; (c) Memonitor, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan keputusan-keputusan yang diambil; (d) Menverifikasi penilaian yang telah dilaksanakan; (e) Mengawasi terlembaganya nilai-nilai kemanusiaan dan prinsip kemasyarakatan; (f) Mewakili masyarakat untuk memberikan kontrol dan masukan terhadap kebijakan pemerintah; (g)

Membangun kerjasama dengan pihak luar (Departemen Pekerjaan Umum).

Badan Usaha Milik Desa Abulo Sibatang Desa Bissoloro merupakan lembaga yang melakukan penanggulangan kemiskinan yang telah terbentuk sejak tanggal 29 Maret 2016. Model-model penanggulangan kemiskinan tersebut diantaranya pemberdayaan, pelatihan- pelatihan (wirausaha) dan bantuan modal pinjaman bergulir bagi masyarakat ekonomi lemah. Tujuan adanya model penanggulangan kemiskinan berbasis kemandirian ini tidak lain adalah untuk mensejahterakan masyarakat miskin Desa Bissoloro.

Secara konseptual, kemiskinan bisa diakibatkan oleh empat faktor, yaitu⁵⁶:

(a) Faktor Individual, terkait dengan aspek patologis, termasuk kondisi fisik dan psikologis si miskin; (b) Faktor Sosial, kondisi-kondisi lingkungan sosial yang menjebak seseorang menjadi miskin; (c) Faktor Kultural, kondisi atau kualitas budaya yang menyebabkan kemiskinan. Faktor ini sering menunjuk pada konsep “kemiskinan kultural” atau “budaya kemiskinan” yang menghubungkan kemiskinan dengan kebiasaan hidup atau mentalitas; (d) Faktor Struktural, menunjuk pada struktur atau sistem yang tidak adil, tidak sensitif dan tidak accessible sehingga menyebabkan seseorang atau sekelompok orang menjadi miskin.

Untuk itu pemerintah Desa Bissoloro Kecamatan Bungaya dalam hal yang menangani langsung adalah BUMDes menerapkan model penanggulangan terkait pada tiga bidang garapannya yaitu bidang lingkungan meliputi betonisasi, pembuatan gorong-gorong,

⁵⁶ Wawancara dengan Masyarakat, Anggota BUMDes Abulo Sibatang, tanggal 26 Mei 2018

pavingisasi, normalisasi saluran. Bidang sosial seperti membantu petani membelikan alat pembasmi hama tikus, alat pencacah jerami, rehab rumah, bantuan WC. Bidang ekonomi mengadakan pelatihan usaha, pinjaman modal bergulir.

Namun yang populer dikalangan masyarakat itu sendiri adalah bidang ekonomi peminjaman modal bergilir, BUMDes Abulo Sibatang dalam penanggulangan kemiskinan hanya memiliki dana yang minim, yang akhirnya membatasi pemberian modal kepada masyarakat, hal ini sesuai yang disampaikan oleh kepala Desa Bissoloro Bapak Abd. Gani Siriwa, berikut hasil wawancara peneliti⁵⁷:

“ia dana yang dialokasikan untuk BUMDes itu tidak banyak, hanya sekitaran 60 juta saja”

Pendapat ini sebelumnya telah peneliti dengar dari Ketua BUMDes itu sendiri untuk menguatkan apakah dana tersebut memang sesuai yang di ucapkan oleh bapak Ridwan, berikut hasil wawancara peneliti⁵⁸ :

“...apalagi keterbatasan dana yang kita miliki yang mana untuk tahun ini kita cuman alokasikan dana 21 juta dari 57 juta yang ada, sebenarnya total dana itu ada 57.400ribu namun yang ditarik sama bendahara hanya 57 juta, jadi 57 juta itu dibagi tiga pengeluaran yang mana untuk simpan pinjam 21 juta untuk usaha desa yang saya kelola 23 juta dan selebihnya itu untuk operasional, seperti pembelian laptop dll..”

⁵⁷ Wawancara dengan Abd.Gani Siriwa, Kepala Desa Bissoloro, Tanggal 28 Mei 2018

⁵⁸ Loc. it

Keterbatasan dana yang dimiliki oleh BUMDes Abulo Sibatang membuat bantuan dana bergilir ini menjadi perebutan di masyarakat namun pihak dari pengelola BUMDes itu sendiri melakukan seleksi kepada masyarakat yang mengajukan dengan syarat utama apakah dia mampu untuk mengembalikan dana dari BUMDes tersebut dalam jangka waktu yang ditentukan.

Selain syarat tersebut diatas, takkalah pentingnya dalam memberikan masyarakat dana bergilir dari BUMDes, pemerintah desa Bissoloro sekaligus pengelola dari BUMDes juga menggunakan pendekatan kekeluargaan, yang dimaksud adalah warga yang akan mengajukan permohonan peminjaman dana harus warga asli Desa Bissoloro, dikarenakan jika warga Bissoloro lebih mudah untuk diberikan karena telah diketahui latar belakangnya.

Warga atau anggota BUMDes yang telah diberikan bantuan oleh BUMDes umumnya merupakan warga yang telah memiliki usaha kecil, yang membutuhkan dana tambahan untuk pengembangan usaha. Dana tersebut diberikan kepada masyarakat dalam bentuk Cash dengan perjanjian yang cukup beragam, tergantung jumlah dana pinjaman yang diambil oleh warga. Sesuai dengan wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada anggota BUMDes yang melakukan peminjaman dana

bergulir semuanya telah memiliki usaha berikut hasil wawancara peneliti kepada para anggota BUMDes yaitu Bapak Syafaruddin⁵⁹ ;

“...jenis usaha saya yaitu barang campuran, usaha ini sudah lama saya tekuni, dan modal awalnya itu dana sendiri...”

Selanjutnya peneliti juga mewancarai Ibu Farida⁶⁰;

“...jenis usaha saya yaitu, bikin kue terus saya jual di pasar, jual mie siram juga dipasar, dana awalnya itu dana pribadi...”

Selanjutnya peneliti juga mewancarai istri dari anggota BUMDes Bapak Abd. Jalil, yang juga memberikan keterangan tentang awal usaha mereka berikut hasil wawancara peneliti⁶¹;

“...jenis usaha saya yaitu warung-warung kecil, saya memilih ini karena meneruskan apa yang sudah ada dari orang tua, kalau dana awalnya yah dana pribadi...”

Jadi bisa dilihat BUMDes dalam penanggulangan kemiskinan di Desa Bissoloro merupakan bentuk pengembangan yang artinya orang yang diberikan modal atau diberdayakan oleh BUMDes adalah orang-orang yang telah memiliki usaha.

Pada umumnya warga yang mengambil dana pinjaman bergulir dari BUMDes wajib mengembalikan dana dalam jangka waktu yang ditentukan oleh BUMDes sesuai dengan persetujuan yang telah BUMDes dan warga itu sendiri sepakati, semisalnya bapak Abdul Jalil yang melakukan pinjaman dana bergulir kepada

⁵⁹ Wawancara dengan Syafaruddin, Anggota BUMDes Abulo Sibatang. Tanggal 15 Mei 2018

⁶⁰ Wawancara dengan Farida, Anggota BUMDes Abulo Sibatang, Tanggal 15 Mei 2018

⁶¹ Wawancara dengan Abd. Jalil, Anggota BUMDes Abulo Sibatang, Tanggal 15 2018

BUMDes menjelaskan kepada peneliti mekanisme jumlah pengambilan dana dan berapa yang akan dikembalikan kepada BUMDes jika mengambil dana pinjaman, berikut hasil wawancara peneliti⁶²;

“...kalo tiga juta kita ambil, harus kita kembalikan 300 ribu dalam satu bulan,..dan ini bisa dibilang berbunga karena kalo ambil 3 juta itu dibayar selama 12 bulan...”

Berdasarkan keterangan dari salah satu anggota BUMDes tersebut diketahui bahwa pengelola BUMDes juga mengambil keuntungan dengan menambahkan satu sampai dua bulan pembayaran kepada anggota BUMDes yang melakukan peminjaman. Dari sinilah pemasukan dana BUMDes yang diberikan kepada Desa sebagai pemasukan tetap buat desa, selain itu BUMDes Abulo Sibatang juga memiliki usaha yang langsung dikelola oleh ketua BUMDes itu sendiri, yakni usaha pertamini, maksudnya usaha tersebut hanya menjual bensin eceran dengan harga yang cukup murah untuk dibeli oleh warga, dengan adanya pertamini ini, warga di Desa Bissoloro menjadi lebih mudah dalam membeli bensin untuk kendaraan mereka dan pengunjung-pengunjung yang datang ke Desa Bissoloro pun ikut terbantu, dengan adanya usaha BUMDes Abulo Sibatang menjual bensin pemasukan untuk Desa bertambah. Tentunya dalam pengelolaan ini ketua BUMDes sekaligus juga pengelola dari usaha pertamini

⁶² Loc. It

memperoleh bagi hasil dari penjualan bensin tersebut. Berikut adalah gambar Usaha Milik Desa Abulo Sibatang yakni pertamini:



Gambar 4.4. Usaha Milik Desa Pertamina Selanjutnya ketika BUMDes telah melakukan pemberian modal kepada para anggotanya, BUMDes tidak memberikan program khusus kepada para anggotanya namun hanya dalam bentuk pemberian modal yang kemudian diberikan arahan oleh para pengelola BUMDes dan selanjutnya para anggota tersebutlah yang secara mandiri mengelolah dan mengembangkan usahanya sendiri.

Secara umum BUMDes Abulo Sibatang dalam pemberian modal bergilir kepada anggotanya sangat membantu para anggotanya dalam mengembangkan usaha mereka, umumnya pula anggota BUMDes yang diberikan modal, mengalami peningkatan pendapat yang cukup baik, hal tersebut sesuai dengan apa yang dialami oleh para anggota BUMDes yang disampaikan kepada

peneliti dalam wawancara, berikut hasil wawancara peneliti kepada anggota BUMDes;

Bapak Syafaruddin⁶³ ;

“Setelah adanya bantuan dari BUMDes pendapatan saya bertambah karena modal pun ikut bertambah sedangkan sebelum ada bantuan dari BUMDes itu pendapatan saya juga sedikit karena modal saya kecil”

Selanjutnya peneliti juga mewawancarai Ibu Farida⁶⁴;

“kendala saya yaitu ketika belum ada bantuan dari BUMDes pendapat saya itu kecil karena modalnya yang kecil setelah ada BUMDes memberikan bantuan dana untuk modal pendapatan saya bertambah karena ditambah modal”

Selanjutnya peneliti juga mewawancarai istri dari anggota BUMDes Bapak Abd, Jalil⁶⁵:

“setelah ada bantuan BUMDes pendapatan warung saya bertambah sedangkan sebelum diberikan modal tambahan oleh BUMDes pendapatan saya kecil”

Berdasarkan keterangan dari anggota BUMDes tersebut peneliti menyimpulkan bahwa dengan adanya bantuan pemberian modal kepada anggota BUMDes pendapatan warga menjadi meningkat, namun setelah adanya bantuan dari BUMDes anggota memiliki tanggungjawab baru yaitu harus mengembalikan dana yang telah mereka pinjam kepada BUMDes sesuai dengan jumlah dan besar dana yang mereka ambil, hal tersebut wajib dilakukan oleh anggota BUMDes, berdasarkan keterangan dari ketua BUMDes Bapak Ridwan, sejauh ini anggota BUMDes yang

⁶³ Op. Cit

⁶⁴ Op. Cit

⁶⁵ Op. Cit

meminjam uang masih tetap rajin untuk membayar walaupun kadang-kadang terlambat, namun pihak dari pengelolah BUMDes tidak memberikan sanksi kepada anggotanya karena masih bersifat kekeluargaan yang digunakan.

Perkembangan anggota pendapatan anggota BUMDes yang sempat peneliti wawancarai dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.4. Perbandingan Pendapatan Masyarakat / Miskin Sebelum dan Setelah ada BUMDes

No	Nama	Jumlah Pinjaman dari BUMDES	Pendapatan Sebelum	Pendapatan Sesudah
1	Syafaruddin	Rp. 5.000.000	Rp. 30.000/h	Rp. 80.000/h
2	Farida	Rp. 3.000.000	Rp. 20.000/h	Rp. 60.000/h
3	Abd. Jalil	Rp. 5.000.000	Rp. 20.000/h	Rp. 50.000/h
4	Ridwan	Rp. 4.000.000	Rp. 30.000/h	Rp. 60.000/h

Sumber : Data Primer

Dilihat dari tabel diatas pendapatan masyarakat miskin dengan adanya program BUMDes cukup berubah, data diatas diperoleh dengan cara melakukan wawancara kebeberapa anggota Bumdes.

Selama ini keberadaan BUMDes di Desa Bissoloro sangat berperan penting dalam penanggulangan kemiskinan. Kinerja BUMDes selama ini pun berjalan dengan baik, bekerja dengan bijaksana, tetap demokrasi. Terdapat perbedaan yang jelas antara sebelum dan sesudah adanya BUMDes adanya manfaat yang betul-betul dirasakan oleh masyarakat miskin.

Peran BUMDes berhasil dalam menanggulangi kemiskinan di Desa Bissoloro melalui program-program yang bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat miskin diantaranya program dalam bidang lingkungan, sosial dan ekonomi tersebut sangat bermanfaat untuk masyarakat miskin. Tindak lanjut terkait peran BUMDes ini lebih bisa meningkatkan kinerjanya dalam penanggulangan kemiskinan di Bissoloro. Diharapkan BUMDes juga dapat menampung dan melaksanakan aspirasi-aspirasi masyarakat miskin khususnya. BUMDes juga tidak akan dapat melaksanakan kerjanya dengan baik jika tidak ada dana dari pemerintah pusat, untuk itu diharapkan kepada pemerintah pusat khususnya, untuk lebih mengutamakan program penanggulangan kepada masyarakat miskinnya agar masyarakat miskin dapat hidup sejahtera.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang peran BUMDes dalam penanggulangan kemiskinan berbasis kemandirian di Desa Bissoloro Kecamatan Bungaya Kabupaten Gowa, maka dapat diperoleh simpulan sebagai berikut.

1. Peran BUMDes dalam menanggulangi kemiskinan di Bissoloro meliputi tiga bidang tersebut yaitu bidang lingkungan, sosial dan ekonomi. Namun program yang paling diunggulkan dan manfaatnya langsung dirasakan oleh masyarakat miskin di bidang ekonomi yaitu modal pinjaman bergulir. Dengan adanya modal pinjaman bergulir ini sangat membantu masyarakat miskin dalam mengembangkan atau mendirikan usaha. Modal pinjaman bergulir dikhususkan pada mereka yang ekonomi lemah. Banyak Anggota BUMDes yang merasakan keuntungan dengan adanya program tersebut. Maka BUMDes sangat berperan dalam mengatasi kemiskinan di Bissoloro.
2. Model penanggulangan yang diterapkan di Desa Bissoloro yaitu melalui pemberdayaan yang terdiri dari mengembangkan skill dengan memberikan arahan serta pemberian modal penambahan usaha. Selain itu sudah ada program pemerintah terdahulu yang menangani penanggulangan kemiskinan semisal PNPM, serta

penanggulangan kemiskinan juga dilakukan dengan memberikan bantuan Raskin, BLT dan Jamkesmas kepada masyarakat miskin. BUMDes juga mempunyai program yang terdapat pada tiga bidang, yaitu bidang lingkungan; bidang sosial; dan bidang ekonomi. Model penanggulangan berupa pemberian modal ini bertujuan agar masyarakat miskin bisa mengembangkan usahanya dan dapat membuka lapangan pekerjaan sendiri dan bisa lebih mandiri tidak lagi bergantung dengan orang lain. BUMDes berhasil dalam penanggulangan kemiskinan berbasis kemandirian. Namun kemandirian yang ditanamkan di sana hanyalah kemandirian dalam segi ekonomi, untuk kemandirian dalam perspektif moral belum maksimal.

B. Saran

Peneliti dapat memberikan saran berdasarkan hasil penelitian tentang peran BUMDes dalam penanggulangan kemiskinan berbasis kemandirian di Desa Bissoloro Kecamatan Bungaya Kabupaten Gowa, sebagai berikut:

1. BUMDes menanggulangi kemiskinan tidak hanya dengan pendekatan ekonomis tetapi juga dengan pendekatan karakter. Dengan kata lain, moral kemandirian pada diri masyarakat miskin harus ditanamkan tidak hanya kemandirian secara ekonomi. Supaya dalam diri masyarakat miskin tidak tertanam rasa malas,

perasaan yang selalu merasa kurang, dan lain sebagainya. Untuk itu mengubah kemandirian secara moral ini sangat diperlukan.

2. Pemerintah Desa Bissoloro, menekankan klasifikasi penggolongan masyarakat miskin, guna meminimalkan jumlah penduduk miskin yang ada di Desa Bissoloro. Seharusnya dalam pemberian pelatihan pemerintah desa harus memberikan secara terus agar masyarakat miskin menambah pengetahuan keterampilannya. Sehingga memberikan peluang lebih kepada mereka untuk mendapatkan pekerjaan agar meningkatkan tingkat kemandirian dan kesejahteraan masyarakat. Program pemerintah yang terdahulu semisal PNPM semestinya tetap dijalankan agar warga dalam memiliki skill yang lebih unggul.
3. Masyarakat miskin, meningkatkan kesadaran untuk membangun dirinya. Dengan adanya model yang diterapkan dalam penanggulangan masyarakat miskin ini bisa memanfaatkan dengan semaksimal mungkin. Artinya jika diadakan pelatihan khususnya pelatihan usaha dapat diikuti dengan baik, apabila mengajukan modal pinjaman bergulir juga bisa dimanfaatkan untuk modal usaha. Pada hakikatnya itu semua bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat miskin.

DAFTAR PUSTAKA

Alqur'an dan Terjemahannya

Ali, Mohammad dan Asrori Mohammad. 2014. *Psikologi Remaja Perkembangan Peserta Didik*. Jakarta: PT Bumi Aksara.

Anwas, Oos M. 2013. *Pemberdayaan Masyarakat di Era Global*. Bandung: Alfabeta.

Aqib, Zaenal dan Sujak. 2011. *Panduan dan Aplikasi Pendidikan Karakter*. Bandung: Yrama Widya.

Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.

Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.

Depag RI. 2005. *Alqur'an dan Terjemahan*. Bandung: Syamil Al-Qur'an.

Departemen Pekerjaan Umum. 2002. *Channeling P2KP (Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan)*. Jakarta: Direktorat Jenderal Cipta Karya.

Departemen Pekerjaan Umum. 2002. *Refleksi Pelaksanaan Tinjauan Partisipatif*. Jakarta: Direktorat Jenderal Cipta Karya.

Departemen Pendidikan Nasional. 2002. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*. Jakarta: Balai Pustaka.

Gustina, Indah. 2008. "Implementasi Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) di Kecamatan Medan Maimun", *Tesis* : Pascasarjana Universitas Sumatera Utara Medan.

Kementerian Pekerjaan Umum. 2002. *Kumpulan Bahan Bacaan Pelatihan Penguatan BKM Tahun ke 2&3*. Jakarta: Direktorat Jenderal Cipta Karya.

Kurniawan, Syamsul. 2014. *Pendidikan Karakter Konsepsi & Implementasi Secara Terpadu di Lingkungan Keluarga, Sekolah, Perguruan Tinggi & Masyarakat*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.

Miles, Matthew B dan A. Michael Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif*. Terj. Tjetjep Rohendi Rohidi. Jakarta: UI Press.

- Moleong, Lexy. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Moleong, Lexy. 2013. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mubyarto. 1988. *Sistem dan Moral Ekonomi Indonesia*. Jakarta: PT. Pustaka LP3ES Indonesia.
- Nareswari, Angkepranita Dhyana. 2006. "Proyeksi Kemiskinan Provinsi Jawa Tengah (Periode Thn 2006-2017)." *Skripsi* : UNDIP Fakultas Ekonomika dan Bisnis Semarang.
- Pedoman Umum P2KP Tahun 1999
- Pedoman Umum P2KP Tahun 2007
- Pedoman Umum PNPM Mandiri Tahun 2007/2008
- Prasetya Irawan. *Penelitian Kualitatif*. <http://www.web-suplemen.ut.ac.id>, (27 November 2017).
- Purnomo, Heru. 2013. "Keefektifan Program Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM/LKM) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Miskin." *Artikel Jurnal Skripsi* : Universitas Negeri Yogyakarta Fakultas Ilmu Pendidikan Yogyakarta.
- Peraturan Pemerintah Dalam Negeri No 39 Tahun 2010 tentang BUMDes
- Rachman, Maman. 2011. *Metode Penelitian Pendidikan Moral*. Semarang : UnnesPress.
- Rohidi, Tjetjep Rohendi. 2000. *Ekspresi Seni Orang Miskin*. Bandung: Yayasan Adikarya IKAPI dan The Ford Foundation.
- Seabrook, Jeremy. 2006. *Kemiskinan Global*. Yogyakarta: CV. Langit Aksara.
- Soekanto. Soerjono. 2007. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Sugiyono. 2013. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung : Alfabeta.
- Suharto, Edi. 2009. *Kemiskinan dan Perlindungan Sosial di Indonesia*. Bandung: Alfabeta.

Suharto, Edi. 2010. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung: PT Refika Aditama.

Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah

Undang-Undang No 33 Tahun 2004 tentang Penimbangan Keuangan Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah

Usman, Sunyoto. 2012. *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Wardan, Anang Solihin. 2009. *Peduli Kemiskinan*. Bandung: PT Rmaja Rosdakarya.

Wijayati, dkk. Upaya Badan keswadayaan Masyarakat (BKM) dalam Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, vol. 1 no.10: h. 35-40.

**L
A
M
P
I
R
A
N**

PEDOMAN WAWANCARA
PENANGGULAN KEMISKINAN BERBASIS KEMANDIRIAN
DI DESA BISSOLORO KECAMATAN BUNGAYA

Narasumber : Kepala Desa
Nama : Abdul Gani Dg. Siriwa
Umur :
Alamat : Bissoloro

Daftar Pertanyaan

1. Apa-apa saja program pembangunan masyarakat dari pemerintah ?
2. Penglibatan masyarakat dalam kegiatan ekonomi oleh pemerintah itu seperti apa ?
3. Bagaimana pemerintah menangani masyarakat yang kurang mampu ?
 - a. Penduduk
 - b. Kesehatan
 - c. Lapangan Kerja
4. Adakah bentuk sinergi program pemerintah lainnya dengan kegiatan BUMDES?

PEDOMAN WAWANCARA
PENANGGULAN KEMISKINAN BERBASIS KEMANDIRIAN
DI DESA BISSOLORO KECAMATAN BUNGAYA

Narasumber : Masyarakat (Yang memanfaatkan BUMDES)

Nama :

Umur :

Alamat : Bissoloro

Daftar Pertanyaan

1. Jenis usaha, kenapa memilih jenis usaha ini?
2. Sumber dana awal dari mana?
3. Bantuan BUMDES dimanfaatkan untuk apa?
4. Kendala dalam menjalani usaha
 - a. Tidak dapat bantuan dari BUMDES
 - b. Setelah mendapat bantuan dari BUMDES

PEDOMAN WAWANCARA
PENANGGULAN KEMISKINAN BERBASIS KEMANDIRIAN
DI DESA BISSOLORO KECAMATAN BUNGAYA

Narasumber : Ketua Pengelola BUMDES

Nama :

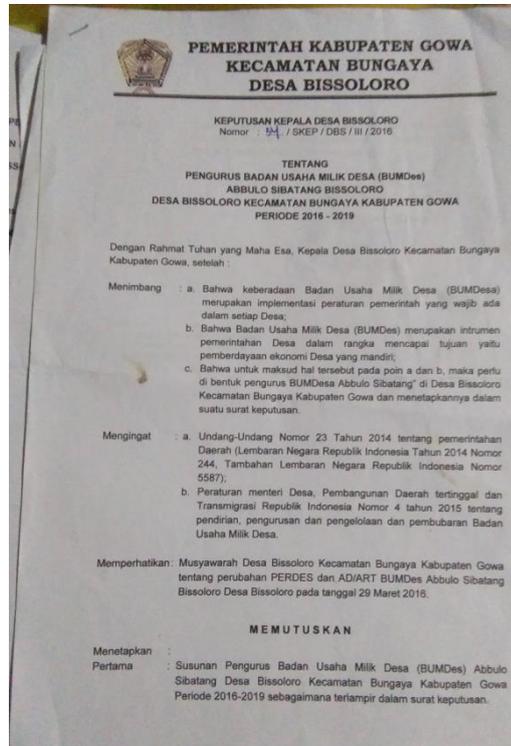
Umur :

Alamat : Bissoloro

Daftar Pertanyaan

1. Apa saja unit usaha BUMDES untuk menggerakkan ekonomi masyarakat?
2. Kegiatan ekonomi apa saja yang dilakukan untuk masyarakat ?
 - a. Pedagangan
 - b. Simpan Pinjam
 - c. Wisata Alam
3. Sejauh mana keterlibatan masyarakat dalam unit usaha BUMDES ?
 - a. Pengurus
 - b. Diberikan Modal Usaha
4. Bagaimana mengantisipasi masyarakat yang diberikan modal tapi terkendala/ tidak dapat mengembalikan dana BUMDES?
5. Kelompok-kelompok seperti apa yang diberikan bantuan oleh BUMDES ?
6. Bagaimana cara BUMDES mendorong masyarakat agar tetap melakukan usahanya?

DOKUMENTASI









RIWAYAT HIDUP



SARMIN lahir di Kajang Kabupaten Bulukumba pada tanggal 18 Juli 1996, anak ketiga dari pasangan Mustamin dan Hasnah.

Terlahir dari rahim Ibu yang penuh kesederhanaan dengan jiwa yang kuat serta senantiasa sabar, Ayah yang begitu keras mendidikku, mengajarku tentang kehidupannya serta mengajarku arti dari Sipakatau, Sipakainge, Sipakalebbi sampai membuatku seperti ini.

Besar dalam keluarga yang sederhana. Namun kaya akan kebersamaan, berlimpah dengan kebahagiaan. Belajar merangkak, berdiri, berjalan, berlari sampai bisa mandiri menuju Kota Daeng dalam menimba Ilmu.

Mengikuti jenjang pendidikan di SD 101 Daloba (2008) Tana Jaya Kecamatan Kajang. Mendapat banyak pengalaman dan pengetahuan dari guru, serta prestasi yang membanggakan kemudian melanjutkan pendidikan di SMPN 1 Kajang (2011). Aktif berorganisasi PRAMUKA dll. Setelah menamatkan SMP lanjut ke sekolah di jenjang lebih tinggi di Kota Daeng tepatnya di MA Negeri 2 Model Makassar (2014).

Kemudian melanjutkan kuliah di UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR (2014) sambil berjuang meraih mimpi untuk NILAI DAN KEHORMATAN yg dipegang teguh.

Saya memiliki keinginan dan tujuan utama yakni "meningkatkan taraf kehidupan keluarga merintis usaha sendiri dan mengembangkannya seperti usaha yang sekarang berjalan.

Sarmin.

24 September 2018



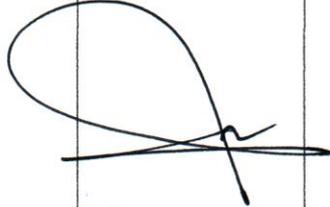
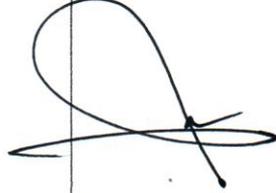
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Kantor : Jl. Sultan Alauddin, Gedung Iqra, Lt. 4 II/17 Fax/Tel. (0411) 851914 Makassar 90223

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU KONTROL BIMBINGANS KRIPSI

Nama : SARMIN
NIM : 10525029915
Judul : Analisis Peran Badan Usaha Milik Desa dalam Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Kemandirian Di Bissoloro Kecamatan Bungaya Kabupaten Gowa
Pembimbing I : Dr. H. Sirajuddin, S.E., M.Si

No	Hari/Tgl	Uraian Perbaikan	Tanda Tangan
1		perbaiki cara penulisan	
2		Perbaiki pembahasan, abstrak dll	
3	28/5 18	see up. dr. yu ite	

Dalam Pembimbingan minimal 3 kali bimbingan untuk mengikuti ujian seminar skripsi

Makassar, Mei 2018 M
Ketua Prodi,



Dr. Ir. H. Muchlis Mappangaja, MP.
NBM: 1201739



FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Kantor : Jl. Sultan Alauddin, Gedung Iqra, Lt. 4 II/17 Fax/Tel. (0411) 851914 Makassar 90223

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU KONTROL BIMBINGANS KRIPSI

Nama : SARMIN
NIM : 10525029915
Judul : Analisis Peran Badan Usaha Milik Desa dalam Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Kemandirian Di Bissoloro Kecamatan Bungaya Kabupaten Gowa
Pembimbing II : Hasanuddin, SE.Sy., ME.

No	Hari/Tgl	Uraian Perbaikan	Tanda Tangan
	00/05/18	- Tambahkan Materi - Perbaiki penulisan sesuai Revisi	
	15/05/18	- Pembahasan & perbaiki, setuju atau tidak tambahkan alasan-	
3	31/05/18	All	

Dalam Pembimbingan minimal 3 kali bimbingan untuk mengikuti ujian seminar skripsi

Makassar, Mei 2018 M
Ketua Prodi,

Dr. Ir. H. Muchlis Mappangaja, MP.
NBM: 1201739



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Nomor : 659/Izn-5/C.4-VIII/V/37/2018
Lamp : 1 (satu) Rangkap Proposal
Hal : Permohonan Izin Penelitian

18 Sya'ban 1439 H
04 May 2018 M

Kepada Yth,
Bapak Gubernur Prov. Sul-Sel
Cq. Kepala UPT P2T BKPMMD Prov. Sul-Sel
di -
Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan surat Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor: 01292/FAI/05/A.6-II/V/39/18 tanggal 4 April 2018, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : SARMIN
No. Stambuk : 10525 0299 15
Fakultas : Fakultas Agama Islam
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Pekerjaan : Mahasiswa

Bermaksud melaksanakan penelitian/pengumpulan data dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul :

"Analisis Peran Badan Usaha Milik Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kemandirian di Bissoloro Kec. Bungaya Kab. Gowa "

Yang akan dilaksanakan dari tanggal 04 Mei 2018 s/d 04 Juni 2018.

Sehubungan dengan maksud di atas, kiranya Mahasiswa tersebut diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan Jazakumullahu khaeran katziraa.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Ketua LP3M,

Dr. Ir. Abubakar Idhan, MP.
NBM 101 7716



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN

Nomor : **5699/S.01/PTSP/2018**
Lampiran :
Perihal : **Izin Penelitian**

KepadaYth.
Bupati Gowa

di-
Tempat

Berdasarkan surat Ketua LP3M UNISMUH Makassar Nomor : 659/Izn-05/C.4-VIII/V/37/2018 tanggal 04 Mei 2017 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

N a m a : **SARMIN**
Nomor Pokok : 10525029915
Program Studi : Hukum Ekonomi Islam
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa(S1)
Alamat : Jl. Sultan Alauddin No. 259, Makassar

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka penyusunan Skripsi, dengan judul :

" ANALISIS PERAN BADAN USAHA MILIK DESA DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BERBASIS KEMANUSIAN DI BISSOLORO KEC. BUNGAYA KAB. GOWA "

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **07 Mei s/d 07 Juni 2018**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami **menyetujui** kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
Pada tanggal : 07 Mei 2018

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN
Selaku Administrator Pelayanan Perizinan Terpadu

A. M. YAMIN, SE., MS.

Pangkat : Pembina Utama Madya
Nip : 19610513 199002 1 002

Tembusan Yth

1. Ketua LP3M UNISMUH Makassar di Makassar;
2. *Pertinggal.*



PEMERINTAH KABUPATEN GOWA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jln. Mesjid Raya No. 30. Telepon. 884637. Sungguminasa – Gowa

Sungguminasa, 11 Mei 2018

K e p a d a

Nomor : 070/623 /BKB.P/2018

Yth. Camat Bungaya

Lamp : -

Perihal : Rekomendasi Penelitian

Di-

T e m p a t

Berdasarkan Surat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sul-Sel Nomor: 5699/S.01/PTSP/2018 tanggal 7 Mei 2018 tentang Rekomendasi Penelitian

Dengan ini disampaikan kepada saudara bahwa yang tersebut di bawah ini:

Nama : SARMIN
Tempat/Tanggal Lahir : kajang, 18 Juli 1996
Jenis kelamin : Laki-Laki
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa (S1)
Alamat : Jl. Sultan Alauddin No. 259 F Makassar

Bermaksud akan mengadakan Penelitian/Pengumpulan Data dalam rangka penyelesaian Skripsi/Tesis di wilayah/tempat Bapak/Ibu yang berjudul **"ANALISIS PERAN BADAN USAHA MILIK DESA DALAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN BERBASIS KEMANDIRIAN DI DESA BISSOLORO KECAMATAN BUNGAYA KABUPATEN GOWA"**

Selama : 7 Mei s/d 7 Juni 2018
Pengikut : Tidak Ada

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka pada prinsipnya kami dapat menyetujui kegiatan tersebut dengan ketentuan :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan kepada yang bersangkutan harus melapor kepada Bupati Cq. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab.Gowa;
2. Penelitian/Pengambilan Data tidak menyimpang dari izin yang diberikan.;
3. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat;
4. Menyerahkan 1 (satu) Eksemplar copy hasil penelitian kepada Bupati Gowa Cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab.Gowa.

Demikian disampaikan dan untuk lancarnya pelaksanaan dimaksud diharapkan bantuan seperlunya.

An. BUPATI GOWA
KEPALA BADAN,

DRS. BAHARUDDIN.T
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP : 19600124 197911 1 001

Tembusan :

1. Bupati Gowa (sebagai laporan);
2. Ketua LP3M UNISMUH Makassar;
3. Yang bersangkutan;
4. Bertindak -



PEMERINTAH KABUPATEN GOWA
KECAMATAN BUNGAYA

Alamat : Jl. Poros Sapaya - Malakaji Kode Pos 92176

Sapaya, 14 Mei 2018

Nomor : 070 / 111 / SEKT-BGY
Lamp : -
Perihal : **Rekomendasi penelitian**

K e p a d a
Yth. Kepala Desa Bissoloro
Di-
Bissoloro

Dengan hormat,

Berdasarkan Surat Kepala Badan Kesatuan Bangsa Politik Kabupaten Gowa, Nomor : 070/623/BKB.P/2018, Tanggal, 11 Mei 2018, tentang Rekomendasi Penelitian.

Dengan ini disampaikan kepada saudara bahwa yang tersebut di bawah ini :

Nama : **SARMIN**
Tempat/Tgl lahir : Kajang, 18 Juli 1996
Jenis kelamin : Laki-Laki
Pekerjaan : Mahasiswa (S1)
Alamat : Jl. Sultan Alauddin No. 259 F Makassar

Bermaksud akan mengadakan Penelitian/Pengumpulan Data dalam rangka penyelesaian Skripsi/Tesis di wilayah/tempat saudara yang berjudul : ***“ANALISIS PERAN BADAN USAHA MILIK DESA DALAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN BERBASIS KEMANDIRIAN DI DESA BISSOLORO KECAMATAN BUNGAYA KABUPATEN GOWA”***

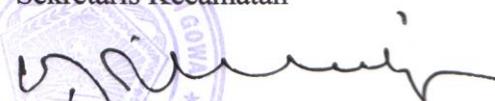
Selama : 7 Mei 2018 s/d 7 Juni 2018
Pengikut : Tidak ada

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka pada prinsipnya kami dapat menyetujui kegiatan tersebut dengan ketentuan :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan kepada yang bersangkutan harus melapor kepada bapak Bupati Cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Gowa;
2. Penelitian tidak menyimpang dari izin yang diberikan;
3. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat;
4. Menyerahkan 1 (satu) Exsemplar Copy hasil kegiatan kepada Camat;

Demikian disampaikan dan untuk lancarnya pelaksanaan dimaksud diharapkan bantuan seperlunya.

An. Camat Bungaya,
Sekretaris Kecamatan


MUH. NATSIR, S.Sos

Pangkat : Penata Tk. I

NIP. 19700101 199303 1 025

Tembusan Kepada Yth.:

1. Bapak Bupati Gowa (Sebagai laporan);
2. Ketua LP3M UNISMUH Makassar;